

***GOOD PUBLIC GOVERNANCE: SOLUSI PERLAKUAN AKUNTANSI
ASET BERSEJARAH (STUDI PADA MUSEUM LA PAWAWOI DI
KABUPATEN BONE***



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

ANITA NURKHAFIFAH

90400114086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Nurkhafifah

NIM : 90400114086

Tempat/Tgl. Lahir : Padaelo, 10 Maret 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam

Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga Lorong V, Romangpolong

Judul : *Good Public Governance*: Solusi Perlakuan Akuntansi
Aset Bersejarah (Studi pada Museum La Pawawoi di
Kabupaten Bone)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, November 2018

Penyusun,

ANITA NURKHAFIFAH

90400114086

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Good Public Governance: Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Museum La Pawawoi Kabupaten Bone”**, yang disusun oleh **Anita Nurkhaifah**, NIM: 90400114086, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, November 2018

Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Munaqisy I : Jamaluddin M, SE., M.Si.

Munaqisy II : Dr. Amiruddin K, M.EI.

Pembimbing I : Dr. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.

Pembimbing II : Ahmad Efendi, SE., MM.



Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalmu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk berpikir yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi panutan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Skripsi dengan judul : **“*Good Public Governance: Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi pada Museum La Pawawoi di Kabupaten Bone)*”** penulis hadirkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materiil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Kasman dan Ibunda Hajirah yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Serta kedua adikku Suaedi dan Siti Fatimah yang selalu menjadi penyemangat penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE, M.Si, Ak. CA selaku penasihat akademik yang selalu memberikan nasihat-nasihat positif yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Dr. Muh. Wahyudin Abdullah, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I beserta bapak Ahmad Efendi, SE, MM selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

7. Seuruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Seluruh staf akademik, tata usaha, perpustakaan, dan jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Bapak Andi Baso Bone Mappasissi selaku pimpinan Museum La Pawawoi, seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, dan BPCB Sul-Sel yang telah memberi izin dan memberikan informasi kepada penulis terkait data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.
10. Nirwana, S.H (*Seulgi*) yang telah menjadi sosok kakak sekaligus jadi tempat curhat bagi penulis, yang selalu memberi nasihat membangun dan penyemangat. *Saranghae*.
11. Sahabat-sahabat saya Rajna Wati, Syamsuriani, dan Jumiati yang meskipun ngumpul 2 kali setahun, terima kasih atas semangat dan dukungan kalian.
12. JIS (Rohayati, Neneng Hardiah, Nita Uzhumaki, dan Nur Abshari Abbas), kalian sangat-sangat banyak membantu. Penulis sangat bersyukur memiliki kalian. Kalian keren!! *See u on Top Guyss*.
13. Rekan-rekan seperjuangan Contabilitas angkatan 2014, terutama Akuntansi B dan C yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan selama mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN angkatan 58 Desa Ajanglaleng Kec. Amali Kab. Bone yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

15. Om *Google* tercinta yang telah menyediakan banyak sekali referensi bagi penulis, sekaligus menjadi penerjemah pribadi yang sangat kompeten. Sci-hub.tw berkatmu penulis bisa mengunduh jurnal berbayar secara gratis, dan hal tersebut sangat bermanfaat.

16. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANITA NURKHAFIFAH
90400114086
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

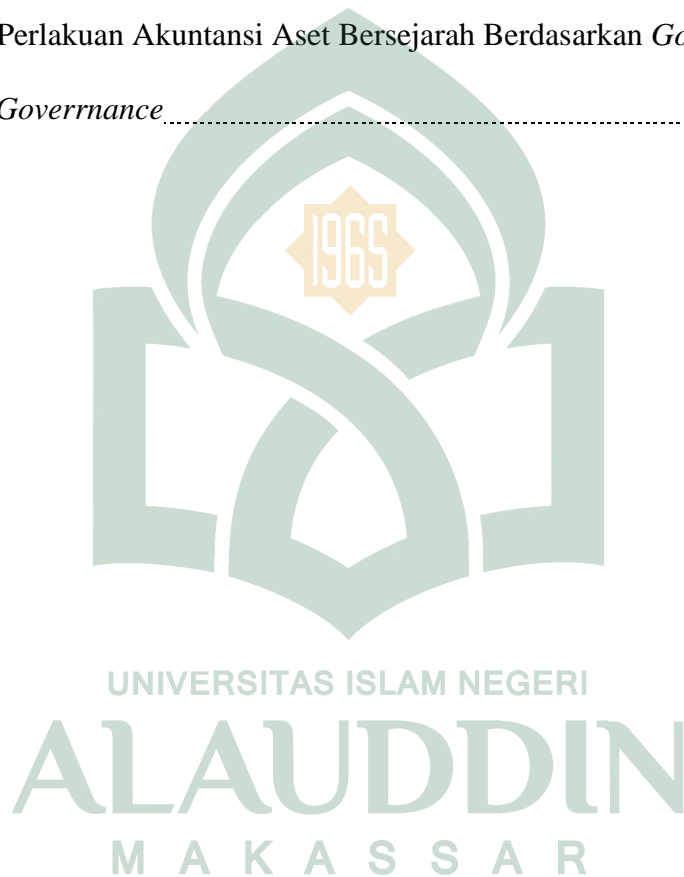
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	
A. <i>Good Public Governance</i>	17
B. Demokrasi.....	21
C. Transparansi.....	22
D. Akuntabilitas.....	24
E. Budaya Hukum.....	26
F. Kewajaran dan Kesenjangan.....	27

G. Aset Bersejarah.....	28
H. Akuntansi Aset Bersejarah.....	32
1. Pengakuan.....	33
2. Pengukuran.....	36
3. Penilaian.....	39
4. Penyajian dan Pengungkapan.....	42
I. Rerangka Pikir.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Tahapan Penelitian dan Analisis Data.....	49
G. Pengujian Keabsahan Data.....	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Museum La Pawawoi.....	52
1. Sejarah Museum La Pawawoi.....	52
2. Profil Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.....	54
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	71
1. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Berdasarkan <i>Good Public Governance</i>	71

a. Pengakuan.....	71
b. Pengukuran.....	78
c. Penilaian.....	80
d. Penyajian.....	83
2. Pengungkapan Aset Bersejarah Berdasarkan <i>Good Public Governance</i>	86
a. <i>Mandatory Disclosure</i>	87
b. <i>Voluntary Disclosure</i>	92
3. Pertanggungjawaban Aset Bersejarah sebagai Barang Publik	98
a. Demokrasi.....	99
b. Budaya Hukum.....	100
c. Transparansi.....	102
d. Akuntabilitas.....	103
e. Kewajaran dan Kesetaraan.....	105
4. <i>Good Public Governance</i> dalam Upaya Merumuskan Praktik Akuntansi Aset Bersejarah.....	106
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Implikasi Penelitian.....	113
C. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2. Perbedaan Sudut Pandang tentang Aset Bersejarah.....	34
Tabel 3. Daftar Potongan Inventarisasi BPCB Susel.....	84
Tabel 4. Daftar Pengungkapan Sukarela.....	97
Tabel 5. Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Berdasarkan <i>Good Public Governance</i>	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rerangka Pikir.....	45
Gambar 2. Potongan atas Catatan Ringkasan BMN Berupa Aset Bersejarah BPCB Sulsel Periode Tahun 2017.....	89
Gambar 3. Contoh Pengungkapan Museum La Pawawoi dalam CaLK.....	90
Gambar 4. Hubungan Antara Item BSC dan MPADI.....	95



ABSTRAK

Nama : Anita Nurkhafifah

NIM : 90400114086

**Judul : *Good Public Governance: Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah*
(Studi pada Museum La Pawawoi di Kabupaten Bone)**

Perlakuan akuntansi aset bersejarah masih menghadapi dilema. Adanya standar yang mengharuskan aset bersejarah dinilai dan diakui di neraca menjadi masalah tersendiri dikarenakan keberadaan aset bersejarah bukan sebagai penghasil arus kas masuk bagi entitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan konsep *good public governance* yang mana menekankan pada kepentingan *stakeholder* demi terciptanya akuntabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan *internet searching*. Penelitian dilakukan pada Museum La Pawawoi di Kabupaten Bone. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dengan pengujian keabsahan data berdasarkan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada konsep *good public governance* dari segi pengakuan aset bersejarah diakui sebagai aset pemerintah dalam kategori barang publik, pengukuran berdasarkan harga perolehan tidaklah sesuai untuk aset bersejarah yang diperoleh melalui donasi dan warisan, adapun beberapa metode penilaian yang diatur dalam standar tidak efektif dalam menentukan nilai moneter dari aset bersejarah yang disebabkan keunikan sifat dan ketiadaan pasar, menyajikan aset bersejarah di neraca dengan nilai harus disertai pengungkapan rinci mengenai informasi deskriptif agar nilai-nilai *intangible* yang terkandung tersampaikan kepada *stakeholder*. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan aset bersejarah bukan hanya melalui laporan keuangan, namun melalui pengungkapan-pengungkapan di luar laporan keuangan demi terpenuhinya kebutuhan dan keterpahaman informasi bagi semua lapisan masyarakat. Pertanggungjawaban aset bersejarah sebagai barang publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan berdampak pada terciptanya pelayanan publik yang baik sebagaimana fungsi keberadaan aset bersejarah, yaitu untuk kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Aset Bersejarah, *Good Public Governance*, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi sektor publik mengharuskan pemerintah untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar dapat dinilai apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien. Transparansi pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari proses munculnya gagasan, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi (Muhammadiyah, 2011). Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik dibutuhkan suatu jaminan bahwa segala aktivitas pemerintah terekam secara baik dalam bentuk laporan, terutama kinerja keuangan yang menjadi fokus perhatian sehingga membutuhkan transparansi yang tinggi. Transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan merupakan suatu isu yang sangat krusial. Kurangnya transparansi dalam sektor pemerintah di buktikan dengan banyaknya kasus korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagaimana dilansir oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat 84 kasus yang diproses hukum dan menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 1,02 Triliun, diakibatkan karena kurangnya transparansi anggaran belanja barang dan jasa kepada publik. Tentu saja hal tersebut akan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sistem pemerintahan dimana melibatkan semua

pemangku kepentingan yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mewujudkan *good governance* dalam pemerintahan bukanlah perkara yang mudah. Tata pemerintahan yang baik mengharuskan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik khususnya penggunaan sumber daya yang berkaitan langsung dengan publik (Rofikoh, 2006). Menurut Sari dan Winarno (2012) bahwa makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa serta bebas dari KKN dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. Untuk itu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008) mengeluarkan pedoman umum *Good Public Governance* (GPG) Indonesia sebagai pedoman pelengkap dalam pelaksanaan *good governance* di Indonesia. *Good public governance* pada dasarnya mengatur hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat, penyelenggara negara dengan lembaga negara dan antar lembaga negara. GPG memiliki beberapa asas diantaranya, asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan yang kesemuanya diharapkan dapat membantu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik. Melalui *good public governance*, peran serta masyarakat dalam pemerintahan terutama dalam pelayanan publik dapat meningkat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Akuntabilitas dalam Islam dikenal sebagai amanah sebagaimana dalam

Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik pember pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.San-Nisa:58)

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada sang pencipta yaitu Allah swt. karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat (Mahlel dkk, 2016). Begitupun dalam pemerintahan, dimana sebagian besar kegiatan didanai oleh pajak yang notabennya berasal dari rakyat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk terbuka kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Begitupula dalam menetapkan peraturan hendaknya mempertimbangkan kepentingan dari para stakeholder termasuk masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan akan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah juga dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan barang-barang publik (*public goods*), karena termasuk dalam aset publik sehingga merupakan komponen penting dalam pemerintahan. Khususnya aset bersejarah dengan karakteristik unik dan memiliki nilai yang sangat tinggi, disediakan oleh

pemerintah untuk keperluan sosial dan budaya bagi masyarakat luas serta pendanaannya berasal dari pajak (Barton, 2000). Lebih lanjut Barton (2000) menyebutkan bahwa aset bersejarah memenuhi atribut sebagai barang publik, untuk itu pemerintah membuat kebijakan untuk pelayanan bahwa aset bersejarah diakui sebagai barang publik karena lebih efektif dan efisien daripada melalui pasar swasta. Merupakan jenis aset yang memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, dan maupun sitaan (Wulandari dan Utama, 2016). Aset bersejarah ditujukan untuk kegiatan non-komersial sehingga harus dikelola sebagai barang publik oleh pemerintah atas nama warganya. Pemerintah mengelola aset bersejarah untuk generasi sekarang dan masa depan serta memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan melestarikannya (Ouda, 2014).

Terdapat berbagai perdebatan dari kalangan ilmuwan terkait aset bersejarah itu sendiri apakah memenuhi definisi sebagai aset atau bukan. Tidak ada definisi legal atau praktik akuntansi tunggal yang dapat diterima untuk aset bersejarah (Wild, 2013), sehingga terdapat dilema dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Aset bersejarah berbeda dari jenis aset lain dalam hal nilai, tidak memungkinkan untuk diproduksi kembali maupun diganti, dan sangat tidak mungkin untuk diperdagangkan (Aversano dan Ghristianes, 2014). Dalam penelitiannya, Carnegie dan Wolnizer (1996); Barton (2000; 2005) menegaskan bahwa aset bersejarah tidak dapat dinilai dengan andal dalam hal keuangan dan mengusulkan aset bersejarah disebut sebagai 'fasilitas' dan dipertanggung jawabkan secara terpisah dari laporan keuangan. Aset bersejarah bukan ditujukan

untuk menghasilkan arus kas (Martins dkk, 2014). Di sisi lain Rowles (1991); Micallef dan Peirson (1997) dalam Ouda (2014) mendukung bahwa aset bersejarah memenuhi definisi aset dan diakui di neraca, aset bersejarah dapat dihitung secara komersial meskipun tidak memungkinkan untuk dijual. Menurut Agustini dan Putra (2011) suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai bangunan bersejarah.

Aset bersejarah jarang diukur, diakui dan dibuktikan oleh kemampuan untuk menghasilkan arus kas masuk (Martins dkk, 2014). Peraturan di Negara-negara termasuk Inggris, Australia, dan New Zealand bahwa aset bersejarah harus dilaporkan sesuai dengan GAAP, termasuk kesesuaian dengan persyaratan standar pelaporan keuangan yang relevan (IFRS) dan kerangka akuntansi yang berlaku (Wild, 2013). Terlepas dari kesesuaian dengan standar yang berlaku, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan tetap menjadi perdebatan panjang. Meskipun telah ada beberapa standar yang mengatur tentang aset bersejarah ini seperti FRS 30 UK dan IPSA 17- *Property, Plant and Equipment* namun kedua standar ini masih memiliki beberapa perbedaan dalam *treatment* pencatatan akuntansi untuk aset bersejarah.

Perdebatan pada tahap pengakuan terletak pada apakah aset bersejarah diakui di neraca dengan alasan bahwa aset bersejarah memenuhi definisi aset (Micallef dan peirson, 1998; dalam Aversano dan Christianes, 2014) atau diakui secara terpisah dari neraca (Barton, 2000). Selain itu, pada tahap pengukuran dan penilaian di setiap negara memiliki perbedaan masing-masing dalam

memperlakukan aset bersejarahnya. Di Inggris mengukur *operational heritage asset* menggunakan pengukuran yang sama dengan aset tetap berwujud lainnya, sedangkan di New Zealand mencatat aset bersejarahnya pada harga perolehan dan berdasarkan pada nilai wajar aset tersebut (Agustini dan Putra, 2011). FRS 30 UK membebaskan memilih metode penilaian yang sesuai dan relevan untuk aset tetap, sedangkan IPSAS 17-*Property, Plant and Equipment* aset yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal dilakukan revaluasi.

Di Indonesia sendiri, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam SAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap yang tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah diantaranya Anggraini dan Chariri (2012); Wulandari dan Utama (2016); Darmawan dkk (2017); Safitri dan Indriani (2017); Solikah dan Achadiyah (2017) yang menemukan bahwa aset bersejarah seperti candi tidak dapat dinilai karena memiliki nilai yang tidak terbatas dan hanya diakui dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset bersejarah dikuasai untuk memberikan manfaat sosial bagi warga negara dan para politisi untuk lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui perbaikan pada pelaporan asetnya. Pengguna utama dari pelaporan keuangan pemerintah bukanlah investor yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan, melainkan wajib pajak dan kontributor yang tertarik untuk menilai apakah pemerintah telah mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang

sesuai (Adam, 2011). Aset bersejarah harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan karakteristik dan sifat khasnya, sehingga pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai pengelolaannya (Basnan dkk, 2015). Untuk itu diperlukan perlakuan akuntansi yang sesuai untuk menjembatani hal tersebut. Penting juga untuk memastikan bahwa pengetahuan dan informasi tentang aset bersejarah menjangkau semua lapisan masyarakat serta dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Bakri dkk, 2012). Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pengelolaan dilakukan dengan baik, sehingga memberikan arah yang jelas kepada semua pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bermaksud ingin mengetahui perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan *good public governance*. Alasan dipilihnya Museum Lapawawoi sebagai *setting* penelitian karena memiliki banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang dilindungi oleh negara.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi yang sesuai untuk aset bersejarah berdasarkan *good public governance*, karena saat ini masih terjadi perdebatan dan tidak adanya standar baik internasional maupun nasional yang menjelaskan secara spesifik mengenai aset ini. Sehingga perlakuan akuntansi di setiap negara bahkan dalam satu negara pun berbeda-beda. Aset bersejarah merupakan barang publik yang mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaannya, untuk itu pemerintah mengeluarkan SAP No. 07 Tahun 2010

Akuntansi Aset Tetap di mana aset bersejarah tidak harus diungkapkan di neraca namun harus diungkapkan dalam CaLK.

Objek dalam penelitian pada Museum Lapawawoi di Kabupaten Bone, dipilihnya objek penelitian tersebut dengan alasan karena museum merupakan salah satu tempat aset bersejarah yang dikelola oleh pihak museum. Pengelolaan aset bersejarah harus dilakukan dengan tepat sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui pengelolaan dan pengungkapan yang memadai, masyarakat akan lebih mengetahui dan paham akan eksistensi dari aset bersejarah.

C. Rumusan Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi pengelolaan barang publik mengharuskan pemerintah untuk menentukan cara terbaik dalam pengelolaan asetnya, termasuk dalam hal ini aset bersejarah. Aset bersejarah dimiliki untuk kepentingan budaya bukan kepentingan untuk mendatangkan pendapatan. Karakteristik unik yang dimiliki oleh aset ini membedakannya dengan jenis aset lainnya sehingga memerlukan perlakuan yang khusus pula. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian aset bersejarah berdasarkan *good public governance*?
2. Bagaimana pengungkapan aset bersejarah berdasarkan *good public governance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian aset bersejarah berdasarkan *good public governance*.
2. Untuk mengetahui pengungkapan aset bersejarah berdasarkan *good public governance*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat aset bersejarah terkait pengelolaan dan perlakuan akuntansinya sehingga tercapai transparansi dalam pengelolaannya. Aset tetap pemerintah seperti bangunan dan peralatan normal lainnya harus dibedakan dengan aset dengan karakteristik tertentu (aset bersejarah) (Christiance dkk, 2012). Hooper (2005) dalam penelitiannya mengajukan argumen apakah dengan memberikan nilai pada aset warisan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset warisan ini.

Yusoff dkk (2013) penelitian yang dilakukan di Malaysia mengatakan bahwa untuk meningkatkan pemulihan dan pemeliharaan aset bersejarah diperlukan suatu undang-undang yang mengatur. Penelitian Hone (1997) mengenai penilaian aset publik menyimpulkan bahwa penilaian aset publik merupakan komponen penting dari pengelolaan sumber daya yang tepat untuk menjalankan kegiatan seperti museum dan galeri seni. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai aset bersejarah akan menjadi pedoman dalam penelitian ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Lucia Biondi dan Irvine Lapsley	<i>Accounting, Transparency and Governance: the Heritage Assets Problem</i>	Membagi transparansi dalam 3 tingkatan dan menemukan bahwa tingkat pertama transparansi tidak mungkin dicapai dalam aset bersejarah, terutama dalam hal penilaian.	Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, dimana menggunakan metode analisis dokumen berupa draf paparan, konsultasi panduan teknis dan persyaratan formal kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi aset

				bersejarah.
2.	Aidatul Fadzlin bakri, Nooridayu Ahmad Yusuf dan Norajlin Jaini	<i>Managing Heritage Assets: Issue, Challenges and the Future of Historic Bukit Jugra, Selangor</i>	Masa depan Bukit Jugra bergantung pada kolaborasi yang sukses antara semua pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kemitraan yang terbentuk bisa mengantisipasi tantangan sekaligus mengoptimalkan keahlian masing-masing.	Perbedaan penelitian terletak pada metode pengumpulan data yang mana menggunakan observasi dan analisis lokasi; narasumbernya merupakan <i>stakeholder</i> dan masyarakat; dan tujuan penelitian yang mana untuk menganalisis isu dan tantangan dalam mengelola aset warisan.
3.	Aisa Tri Agustini dan Hendrawan	Aset Bersejarah dalam Pelaporan	Aset bersejarah yang memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal dapat disajikan	Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan

	Santosa Putra	Keuangan Entitas Pemerintah	dalam neraca. Biaya yang andal dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset bersejarah itu diperoleh. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metoda yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai nilai pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan.	yaitu studi literatur yang bertujuan untuk menjelaskan masalah-masalah berkaitan dengan akuntansi aset bersejarah.
4.	Allan Barton	<i>The Conceptual Arguments Concerning Accounting for Public Heritage Assets: A Note</i>	Penerapan standar akuntansi komersial pada aset warisan tidaklah tepat, aset bersejarah harus disajikan terpisah dari laporan keuangan entitas pemerintah.	Perbedaan penelitian terletak pada perspektif teori yang digunakan, yaitu menjelaskan aset bersejarah dari sudut pandang

				teori barang publik. Jurnal ini juga merupakan penjelasan atau komentar atas penelitian Hooper dkk (2005) mengenai aset bersejarah.
5.	Keith Hooper, Kate Kearins dan Ruth Green	<i>Knowing “the Price of Everything and the Value of Nothing”: Accounting for Heritage Assets</i>	Manajer museum dan akuntan lebih memilih untuk mengarahkan perhatian mereka terkait pelestarian dan pemeliharaan aset bersejarah dan bukan meletakkan nilai finansial pada aset tersebut.	Perbedaan penelitian terletak pada sumber data yang digunakan yaitu berupa <i>annual report</i> dari beberapa museum serta narasumber dalam penelitian ini merupakan ikatan akuntansi di New Zealand.
6.	Allan D.	<i>Accounting for</i>	Akuntansi komersial	Perbedaan

	Barton	<i>Public Heritage Facilities – Assets or Liabilities of the Government?</i>	tidak relevan untuk fasilitas warisan publik karena tujuannya bersifat sosial daripada ekonomi. Dikatakan bahwa fasilitas tersebut adalah aset yang dipercayai oleh pemerintah dan karenanya tidak boleh disertakan dalam laporan keuangan bertujuan umum.	penelitian terletak pada fokus penelitian dimana membahas aset bersejarah sebagai barang publik sehingga dibedakan dengan barang swasta dan menguji kelayakan perlakuan akuntansi aset bersejarah serta informasi yang terkandung didalamnya.
7.	Hassan A.G. Ouda	<i>Towards a Practical Accounting Approach for Heritage</i>	Kerangka pelaporan untuk entitas sektor swasta berdasarkan GAAP tidak sesuai untuk entitas sektor	Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan

		<i>Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practice</i>	<p>publik yang memiliki aset bersejarah karena entitas dan aset tersebut dibedakan dalam tujuan dan esensi. Penggunaan model pelaporan komersial gagal memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif dari kegunaan yang diuraikan dalam kerangka konseptual untuk Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum oleh entitas sektor publik.</p>	<p>analisis kritis terhadap literatur yang relevan dengan aset bersejarah, serta menggunakan konsep NPM.</p>
--	--	--	--	--

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan konsep *good public governance* yang

mana pedoman umumnya diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008. *Good public governance* pada dasarnya mengatur hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat, penyelenggara negara dengan lembaga negara, dan antara lembaga negara.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada Museum Lapawawoi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan aset bersejarah, untuk pihak manajemen museum dapat menentukan pengelolaan aset bersejarah yang lebih komprehensif, untuk pihak akuntansi dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam perbaikan maupun perubahan dalam hal pencatatan akuntansi aset bersejarah.
3. Manfaat regulasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penetapan standar khusus akuntansi aset bersejarah, dengan adanya standar khusus tersebut sehingga dapat menyempurnakan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) No. 07 tahun 2010 Akuntansi Aset Tetap tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Good Public Governance*

Pedoman umum *good public governance* Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008, dalam sambutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *good public governance* merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. *Good public governance* pada dasarnya mengatur hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat, antara penyelenggara negara dengan lembaga negara, dan antara lembaga negara. Penerapan *good public governance* sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan *good corporate governance* dalam dunia usaha dan diharapkan keduanya bersinergi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selain penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural), dunia usaha dan masyarakat memiliki kepentingan dan peran dalam mewujudkan *good public governance* (KNKG, 2008), oleh karena itu diperlukan tiga pilar utama dalam menciptakan situasi kondusif penerapan *good public governance* yang terdiri dari:

1. Negara, berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Dunia Usaha, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.
3. Masyarakat, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Pelaksanaan peran dan keterlibatan masing-masing pihak antara negara, swasta dan masyarakat akan melahirkan suatu kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta terciptanya sistem pemerintahan terbuka dan sehat.

KNKG (2008) *good public governance* terdiri dari asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara; Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif; Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya

secara bertanggungjawab; Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law inforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen; Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab.

Penelitian Bovaird dan Loffler (2003) menyebutkan bahwa pengukuran *good governance* dapat didorong melalui pemberian penghargaan, inspeksi, penetapan kondisi pendanaan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam melakukan fungsi kontrol. Azlim dkk (2012) penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak terlepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaporan keuangan dengan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sari dan Winarno (2012) makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa serta bebas KKN dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. *Good governance* memiliki prinsip dasar: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi,

kepedulian terhadap *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi proses pemerintahan dan akuntabilitas. Perwujudan dari terlaksananya hubungan sinergis dalam sistem *good governance*, pemerintah berupaya melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan (Setyobudi, 2013). Begitu juga dalam pelayanan publik. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
- 3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
- 4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berangkat dari konsep *good governance*, dipemerintahan selain tuntutan akan pertanggungjawaban keuangan juga menyangkut bagaimana pengelolaan barang-barang (*goods*) publik. Handoko (1994) dalam Ariningsih dan Nugroho (2015) konsep pengelolaan yaitu suatu cara dalam manajemen suatu perusahaan dimana menggunakan cara-cara tertentu untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Pengelolaan masalah-masalah publik menyebabkan menurunnya penyampaian pelayanan publik kepada masyarakat khususnya menyangkut barang-barang yang bersifat publik (*public goods*) (Kurniawan, 2007). Aset publik merupakan komponen penting dalam pemerintahan, untuk itu memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, khususnya aset bersejarah yang tinggi akan nilai sosial budayanya yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

Aset bersejarah memenuhi atribut sebagai barang publik. Terdapat eksternalitas, untuk itu pemerintah membuat kebijakan untuk pelayanan bahwa aset bersejarah diakui sebagai barang publik karena lebih efektif dan efisien daripada melalui pasar swasta, dan untuk pendanaannya sendiri berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat (Barton, 2000). Aset bersejarah disediakan oleh pemerintah untuk keperluan sosial dan budaya bagi masyarakat luas. Terbuka untuk publik dan semua masyarakat memiliki hak untuk menggunakan dan menikmatinya. Aset bersejarah ditujukan untuk kegiatan non-komersial, untuk itu harus dikelola sebagai barang publik oleh pemerintah atas nama warganya.

B. Demokrasi

Demokrasi memiliki dimensi sosial yang berarti demokrasi bertalian dengan kesejahteraan umum, demokrasi memikul tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum (Manan dan Harijanti, 2014). Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi individu atau kelompok tertentu. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam pengambilan keputusan publik. Penting untuk menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan pemerintah yang menjamin hak publik atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagai barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa (Jailani, 2015). KNKG (2008) asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus berdasarkan pada kepentingan negara dan

masyarakat serta dalam penyusunan kebijakan publik harus bersifat terbuka dan partisipatif terhadap dunia usaha maupun masyarakat.

Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pemerintahan. Bahkan lebih jauh, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah segala kegiatan bernegara ditujukan, hal ini merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat (Noviati, 2013). Thamrin (2017) menyebutkan bahwa partisipasi warga yang efektif berarti membuka saluran informasi dimana mereka dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Diperlukan adanya penuntun atau petunjuk yang jelas untuk mendorong keterlibatan warga negara dalam *governance*, terutama ditingkat lokal menuju pada transformasi yang lebih adil dan setara. Sehingga warga sipil maupun organisasinya dapat dengan jelas mengambil keputusan dan tindakan kapan, bagaimana, dengan kondisi apa mereka dapat terlibat secara optimal dalam proses-proses pengambilan keputusan publik.

C. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik, baik terkait informasi keuangan maupun informasi lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan (Hehanussa, 2015). Krina (2003) dalam Hanifah dan Praptoyo (2015) prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi serta penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

Menurut Grimmelikhuijsen (2010) transparansi pemerintah dianggap sebagai nilai demokrasi, elemen penting bagi pemerintah yang berkinerja tinggi dan dapat dipercaya, namun transparansi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pemerintahan daerah tidak dapat terpenuhi. Terutama transparansi dalam hal informasi keuangan seperti dalam penelitian Heald (2012) bahwa untuk mencapai transparansi tentang belanja publik menghadapi tantangan yang memerlukan strategi eksplisit dalam konteks kelembagaan. Bagaimana mekanisme transparansi disusun yang berdampak pada kebijakan publik. Lebih lanjut Heald (2012) menyebutkan prinsip umum dalam mewujudkan transparansi yaitu: *Pertama*, transparansi dapat ditemukan dalam pengungkapan informasi yang tepat waktu. *Kedua*, unsur penting transparansi adalah cakupan komprehensif dan hirarki dokumen pelaporan yang dirancang dengan baik, sehingga pengguna dapat menelusuri dengan baik gambaran mengenai entitas. *Ketiga*, transparansi yang efektif harus menjadi dua arah antara mereka yang membuat akun dan pengguna akun potensial. *Keempat*, adanya kapasitas pengawasan diluar badan legislatif

patut dihargai. *Kelima*, peran audit publik sangat penting untuk transparansi yang efektif, baik dari segi validasi pelaporan keuangan dan dalam hal perannya yang lebih luas dalam kaitannya dengan keteraturan, kepatuhan, dan kinerja.

Lee dan Kwak (2012) mengembangkan sebuah model keterlibatan publik dalam pemerintahan yaitu “*An Open Government Maturity Model*”, yang dikembangkan khusus untuk menilai dan memandu inisiatif pemerintah yang berfokus pada keterlibatan publik yang transparan, interaktif, partisipatif, kolaboratif yang sebagian besar dimungkinkan oleh teknologi baru seperti media sosial. Model tersebut terdiri atas lima tingkat kematangan: kondisi awal (level 1); transparansi data (level 2); partisipasi terbuka (level 3); kolaborasi terbuka (level 4); dan keterlibatan dimana-mana (level 5). Penelitian Dawes dan Helbig (2010) tentang strategi informasi untuk pemerintahan terbuka masih menghadapi tantangan dalam membuat data pemerintah sesuai dengan pengguna yang menghasilkan nilai sosial dan ekonomi. Meskipun demikian asas transparansi ini tidak menghalangi pemerintah dalam menjaga kerahasiaan negara sesuai dengan amanat undang-undang.

D. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kebijakan serta program yang telah ditetapkan (Dhiza, 2017). Istilah akuntabilitas biasanya digunakan untuk menggambarkan tanggungjawab bahwa mereka yang mengelola atau mengendalikan sumber daya terdapat kepentingan orang lain (Wei dkk, 2008). Weber (1999) menekankan perlunya organisasi untuk mengejar responsivitas

dalam mekanisme pertanggungjawaban mereka dengan memastikan bahwa pengaturan tata kelola dan keputusan strategis sesuai dengan tuntutan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas organisasi. Jika otoritas bersama dianggap serius dan para pemangku kepentingan terlibat, akuntabilitas akan lebih efektif dan bermakna (Legget, 2018). Randa dan Daromes (2014) dari hasil penelitiannya menunjukkan dua jenis akuntabilitas yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat).

Wen (2007) dalam Ouda (2014) mengidentifikasi kelompok berikut sebagai pemangku kepentingan pengelolaan dan akuntansi aset warisan: Pemerintah dan Instansi yang bertanggung jawab; Warga Negara dan Masyarakat Lokal; Infrastruktur dan Layanan Lokal; Profesional dan Konsultan; Pengelolaan; Kreditur; Wisatawan; LSM; dan Sektor Publik dan/ atau Sektor Swasta lainnya. Selain itu perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Pemerintah mengelola aset warisan untuk generasi sekarang dan masa depan serta memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikannya (Ouda, 2014). Howard (2003) menyebutkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan, terutama penduduk setempat sangat penting, dan yang terbaik adalah membiarkan masalah teknik konservasi kepada mereka yang secara tradisional dikaitkan dengan aset bersejarah yang dikelola. Rencana pengelolaan akan menjadi rujukan utama untuk mengidentifikasi tindakan yang sesuai dan

mempermudah proses pengambilan keputusan. Implementasi yang baik dari rencana pengelolaan akan memberikan hasil terbaik demi kepentingan terbaik masyarakat (Bakri dkk, 2012).

E. Budaya Hukum

Menurut Syamsudin (2007) budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum. KNKG (2008) budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law inforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik karena didukung oleh partisipasi masyarakat (*public participation*), pada masyarakat seperti ini meskipun struktur dan substansinya tidak terlalu baik, namun hukumnya tetap akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, sebaik apapun struktur dan substansi suatu aturan jika tidak ada dukungan masyarakat maka hasil dari penegakan hukum tidak akan baik (Fendri, 2011).

Sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sub sistem yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berperan dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan yang dapat mengakibatkan terjadinya kondisi ketidakpastian hukum, sehingga tercapainya tujuan penegakan hukum yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan

bagi rakyat (Budoyono, 2014). Disamping itu, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan dilapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang berakibat terjadinya inkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial (Fendri, 2011). Termasuk dalam hal ini penegakan hukum terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah yang sering kali luput dari perhatian, seperti pada penelitian Harjiatni dan Raharja (2012) bahwa perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di kota Yogyakarta masih lemah, masih terdapat benda/bangunan yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya.

F. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan merupakan kepatuhan aparat pemerintah terhadap peraturan yang berlaku. KNKG (2008) Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab. Asas kewajaran dan kesetaraan menuntut perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kharisma, 2014).

Kewajaran dan kesetaraan diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat lebih menaati hukum, untuk mencapai tujuan tersebut lembaga negara

dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2008). Informasi yang dihasilkan oleh organisasi yang merupakan alat manajemen dalam pengambilan keputusan dan evaluasi, sehingga kewajaran informasi yang disampaikan akan sangat berpengaruh terhadap pembuat keputusan (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2017). Wujud dari pelaksanaan asas kewajaran dan kesetaraan ini yaitu adanya pelayanan publik yang berkualitas dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat.

G. Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan barang publik dengan karakteristik unik dan sarat akan nilai-nilai budaya yang penting bagi masyarakat, sebagaimana IPSASB menggambarkan aset bersejarah sebagai:

“Barang-barang yang dimaksudkan untuk diadakan tanpa batasan waktu dan dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan karena kelangkaan dan/atau kepentingannya dalam hubungan, namun tidak terbatas pada arkeologi, arsitektural, artistik, budaya, lingkungan, sejarah, alam, ilmiah atau teknologi.”

Lebih lanjut, senada dengan penggambaran IPSASB, *Financial Reporting Standar* (FRS) 30 UK mendefinisikan aset bersejarah sebagai berikut:

“Aset bersejarah adalah aset tetap yang memiliki nilai sejarah, seni, pengetahuan, teknologi, dan lingkungan yang dijaga kelestariannya sebagai kontribusi atas budaya dan ilmu pengetahuan.”

Aversano dan Christianes (2014) mendefinisikan aset bersejarah sebagai aset yang penting bagi budaya, sejarah dan identitas sebuah negara. Utamanya dimiliki untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Aset bersejarah umumnya merupakan aset fisik yang ingin dipertahankan masyarakat tanpa batas waktu

karena kepentingan budaya, historis, rekreasi atau lingkungan dan bukan untuk menghasilkan pendapatan. Termasuk karya seni, museum, koleksi perpustakaan, bangunan, monumen, peringatan, taman nasional, taman maritim, situs arkeologi dan lain-lain (Hassan dkk, 2016).

Aset bersejarah ditimbulkan oleh suatu peristiwa dan menyangkut jejak orang yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap negara serta pada kehidupan selanjutnya, karena alasan inilah pemerintah senantiasa mempertahankan dan melestarikan aset bersejarah untuk generasi mendatang (Agustini dan Putra, 2011). Keberadaan aset bersejarah bukan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pendidikan dan budaya (Darmawan dkk, 2017). Aset bersejarah memiliki peran penting disetiap negara dalam melindungi sejarah, budaya, lingkungan dan fasilitas rekreasi untuk kesenangan masyarakat. Aset-aset ini sangat unik sehingga pemerintah memilih untuk memberikan perlakuan khusus dengan menyebutnya sebagai fasilitas umum, terbuka untuk umum dengan atau tanpa biaya (Barton, 2005). Aversano dan Christianes (2014) aset bersejarah hanya memenuhi definisi potensi layanan.

Aset bersejarah tersedia untuk umum dan didanai dari pajak ataupun hibah. Agustini dan Putra (2011) aset bersejarah memang seharusnya menjadi bagian dari aset pemerintah yang bernilai yang digunakan untuk pelayanan publik atau untuk kepentingan masyarakat selama hal tersebut tidak merugikan. Merupakan jenis aset yang unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan

maupun sitaan (Wulandari dan Utama, 2016). Berbeda dengan aset lain yang tidak mungkin untuk diproduksi kembali dan sangat tidak mungkin untuk dijual (Barton, 2000)

Menurut PP no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan 07 paragraf 66, aset bersejarah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin untuk secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Barton (2000) mengidentifikasi karakteristik aset bersejarah untuk tujuan akuntansi sebagai berikut:

1. Dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan sosial dan bukan untuk keperluan administrasi atau keuntungan finansial;
2. Pengoperasian sebagian besar didanai oleh pemerintah dari pendapatan perpajakan dan/atau sumbangan pribadi;
3. Biaya pengguna, jika ada biasanya hanya memberi kontribusi sebagian kecil dari dana yang dibutuhkan;
4. Dipertahankan dan dipelihara dalam kondisi yang baik secara terus-menerus untuk dinikmati generasi sekarang dan masa depan karena atribut khusus dan dihargai;
5. Tidak untuk dijual;
6. Terbuka untuk umum dan manfaatnya mengalir ke pengguna, bukan ke entitas pengelola; dan

7. Masyarakat didorong menggunakan fasilitas melalui promosi dan akses gratis atau dengan biaya yang sangat rendah.

Peran aset bersejarah berbeda dengan yang dimiliki aset komersial normal (Hooper, 2005). Carnegie dan Wolnizer (1996); Barton (2000; 2005) berpendapat bahwa aset bersejarah harus dibedakan, dan mengusulkan aset bersejarah sebagai 'fasilitas'. Sedangkan Pallot (1990) dalam Christians dkk (2012) menyimpulkan bahwa aset bersejarah harus disebut sebagai 'aset masyarakat'. Ouda (2014) menganggap aset bersejarah sebagai 'aset terbatas' karena tidak bisa diganti atau dijual yang disebabkan adanya batas legal, sosial dan budaya.

Di Inggris, *standard-setter* membuat perbedaan antara aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non-operasional. Aset bersejarah untuk tujuan operasional merupakan aset yang digunakan untuk tujuan selain pemeliharaan warisan nasional, seperti bangunan bersejarah yang dijadikan sebagai ruang perkantoran. Jenis aset warisan ini akan dikapitalisasi. Sedangkan untuk non-operasional meliputi koleksi museum dan galeri, karya seni, arsip nasional, situs arkeologi, reruntuhan, monumen dan patung (Ouda, 2014). SAP No.07 paragraf 71 bahwa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai budayanya, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset bersejarah jarang diukur, diakui dan dibuktikan oleh kemampuan untuk menghasilkan arus kas masuk, dan mungkin ada hambatan hukum atau sosial yang mencegah penggunaannya untuk tujuan tersebut (Martins dkk, 2014). Terdiri dari komponen *tangible* dan *intangible* yang sangat berharga dari modal

ekonomi, sosial budaya dan alam dari banyak entitas sektor publik. Memberi kontribusi nilai kualitatif yang signifikan terhadap masyarakat dalam bentuk sosial dan identitas nasional. Pemberian nilai ekonomi terhadap koleksi aset bersejarah pada dasarnya tidak tepat dan dianggap tidak memberikan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan (Wild, 2013).

Biondy dan Lapsley (2014) dalam penelitiannya mendukung pertimbangan berikut:

1. Tidak ada definisi sama sekali mengenai aset bersejarah;
2. Tidak jelas ‘nilai publik’ apa yang bisa dikaitkan dengan aset bersejarah;
3. Perdebatan mengenai penetapan standar untuk aset bersejarah meningkat selama bertahun-tahun, namun masih sulit dan masih terdapat tantangan;
4. Jika standar akuntansi diterapkan pada aset bersejarah, mungkin akan ada kasus untuk bentuk akuntansi aset warisan tersendiri yang dikembangkan dan mencakup indikator kualitatif.

Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis baik yang mudah dipindahkan maupun berupa bangunan, dimiliki umum, yayasan atau milik pribadi (Agustini dan Putra, 2011). Oleh karena itu sudah sepatutnya aset bersejarah diakui dan dikelola dengan selayaknya, demi terciptanya tata kelola yang baik sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

H. Akuntansi Aset Bersejarah

Agustini dan Putra (2011) tidak semua aset pemerintah diakui dan dinilai dalam neraca. Pada kenyataannya ketika sebuah entitas membuat laporan keuangan, aset selalu dimunculkan dalam neraca. Namun tidak halnya dengan aset

bersejarah. Tidak ada definisi legal atau praktik akuntansi tunggal yang dapat diterima untuk aset bersejarah (Wild, 2013). Terdapat perbedaan konseptual yang cukup besar antara *operational heritage assets* dan *non-operational heritage assets* yang menyebabkan variasi yang cukup besar dalam pelaporannya.

Peraturan di negara-negara termasuk Inggris, Australia dan Selandia Baru bahwa aset bersejarah harus dilaporkan sesuai dengan GAAP, termasuk kesesuaian dengan persyaratan standar pelaporan keuangan yang relevan (IFRS) dan kerangka akuntansi yang berlaku (Wild, 2013). Beberapa pendukung pengakuan aset warisan di neraca Rowles (1991); Micallef dan Peirson (1997) dalam Ouda (2014) berpendapat bahwa representasi tidak mungkin dilakukan tanpa memberikan nilai moneter. Mereka percaya bahwa aset bersejarah dapat dihitung secara komersial meskipun tidak mungkin dijual.

1. Pengakuan (*Recognition*)

Suwardjono (2016:134) mendefinisikan pengakuan sebagai pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. Lebih lanjut FASB dalam Suwardjono (2016:195) menetapkan empat kriteria pengakuan fundamental (konseptual) sebagai berikut: definisi (*definition*); keterukuran (*measurability*); keberpautan (*relevance*); dan keterandalan (*reliability*).

Pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan sektor publik konsisten dengan prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM), dimana seluruh aset yang berada dibawah kendali sektor publik harus diakui dalam neraca termasuk

aset bersejarah. Para ahli dibidang ini memiliki perbedaan pendapat mengenai pengakuan aset bersejarah, sebagaimana dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2
Perbedaan Sudut pandang tentang Aset Bersejarah

Penulis	Sudut Pandang
Nasi dkk (2001); Christianes (2004)	Aset bersejarah tidak boleh dilaporkan dalam neraca .
Barton (2000)	Aset bersejarah harus di sajikan dalam anggaran terpisah sebagai aset layanan.
Micallef dan peirson (1998)	Aset bersejarah memenuhi definisi aset dan diakui di neraca.
Rowles dkk (1998)	Aset bersejarah harus dilaporkan di neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi.
Carnegie dan Wolnizer (1996)	Aset bersejarah tidak termasuk aset dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban atau alternatifnya sebagai fasilitas dan mengungkapkannya secara terpisah.
Pallot (1990), (1992)	Aset bersejarah harus diwakilkan pada kategori aset terpisah sebagai aset masyarakat.
Mautz (1988)	Aset bersejarah harus diakui berbeda sebagai fasilitas.

Sumber: Aversano dan Christianes (2014)

SAP No. 07 paragraf 15:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

FRS 30 UK menyatakan bahwa entitas harus melaporkan aset bersejarah sebagai aset tetap berwujud dan mengenali dan mengukur aset ini sesuai dengan persyaratan FRS 15 'Aktiva Tetap Berwujud', dimana informasi mengenai biaya tersedia, maka aset bersejarah:

- a. Disajikan dalam neraca terpisah dari aset tetap berwujud lainnya;
- b. Neraca atau catatan akun harus dilaporkan sebesar biaya perolehan dan penilaiannya; dan
- c. Perubahan dalam penilaian harus diakui.

Apabila informasi nilainya tidak tersedia, dan tidak dapat diperoleh dengan biaya yang sepadan dengan manfaat bagi pengguna laporan keuangan, aset tidak akan di laporkan di neraca dan melakukan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar ini. Dalam IPSAS 17- *Property, Plant and Equipment* dikatakan bahwa aset tetap harus diakui sebagai aset jika: kemungkinan keuntungan ekonomi masa depan atau potensi layanan yang terkait dengan barang tersebut akan mengalir; dan biaya atau nilai wajar barang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset bersejarah di setiap negara pun berbeda-beda tergantung standar yang berlaku di negara masing-masing, seperti Australia yang mengakui

aset bersejarah jika hanya manfaat ekonomi dari aset kemungkinan besar dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Sedangkan New Zealand mengharuskan semua aset tetap termasuk aset bersejarah untuk diakui dalam laporan keuangan entitas pemerintah. Adapun di Inggris membagi aset bersejarah berdasarkan pemeliharaannya yaitu *operational heritage assets* dan *non-operational heritage assets*, dimana keduanya diakui sebagai aset dalam laporan keuangan. Namun, jenis *non-operational heritage assets* seperti koleksi museum, seni dan lain-lain nilainya tidak dikapitalisasi. Indonesia sendiri mengakui aset bersejarah jika memberi potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, seperti bangunan bersejarah yang digunakan sebagai gedung perkantoran, maka diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Selebihnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Suwardjono (2016:133) pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada objek yang terlibat dalam transaksi keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Atribut pengukuran menurut FASB terdiri atas: kos historis atau perolehan kos historis (*historical cost* atau *proceeds*); kos sekarang (*current cost*); nilai pasar sekarang (*current market value*); nilai terealisasi/pelunasan neto (*net realizable/ settlement value*); dan nilai sekarang diskunan aliran kas masa datang (*present or discounted value of future cash flows*). Sedangkan menurut IPSASB basis pengukuran aset tetap meliputi: biaya

historis (*historical cost*); nilai pasar (*market value*); biaya pengganti (*replacement cost*); harga jual bersih (*net selling price*); dan *value in use*.

SAP No. 07 tahun 2010 mengharuskan aset tetap dinilai pada biaya perolehan, dan apabila tidak memungkinkan maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan. Sejalan dengan metode yang digunakan pada IPSA 17- *Property, Plant and Equipment* bahwa item aset tetap yang memenuhi syarat untuk pengakuan sebagai aset harus diukur dengan biaya perolehan, dan jika diperoleh bukan melalui pertukaran maka harus diukur menggunakan nilai wajar.

Praktik pengukuran aset bersejarah memiliki persepsi disetiap negara, hal ini disebabkan standar disetiap negara memiliki model pengukuran tersendiri bagi aset bersejarahnya. Australia menggunakan metode yang sama dalam menilai antara *operational heritage assets* dan *non-operational heritage assets*-nya. Memiliki tiga kriteria pengukuran aset bersejarah sebagai berikut (Agustini dan Putra, 2011):

- a. Jika kos suatu aset dapat ditentukan, maka harus diukur dengan menggunakan nilai wajar;
- b. Jika kos suatu aset bersejarah tidak dapat ditentukan, maka pemerintahan Australia menggunakan jasa pengukur (*appraiser*) dari luar; dan
- c. Jika aset bersejarah tidak memiliki kos yang dapat ditentukan secara andal, maka dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Dialokasikan masing-masing \$1000.

Adapun prosedur nilai wajar yang digunakan (Agustini dan Putra, 2011):

1. Apabila terdapat pasar aktif dan likuid, maka nilai wajarnya adalah dengan menggunakan harga pasar;
2. Apabila tidak terdapat pasar aktif dan likuid tetapi ada bukti pasar untuk aset serupa maka estimasi nilai wajarnya menggunakan bukti pasar (*market evidence*);
3. Apabila tidak terdapat pasar atau harga beli dan harga jual pasar berbeda secara material nilai wajar ditentukan dengan referensi harga beli pasar dari aset tersebut;
4. Apabila harga pasar tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari aktivitas pasar, nilai wajarnya ditentukan oleh apakah potensi jasa aset tersebut tergantung atau tidak pada perolehan arus kas masuk bersih. Apabila potensi jasa tidak tergantung pada perolehan arus kas masuk bersih, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan *written down current cost* (jika aset akan diganti bila aset entitas hilang) atau *market selling price* (jika aset tidak akan mengganti bila aset entitas menghilang).

Di Inggris mengukur *operational heritage asset*-nya menggunakan pengukuran yang sama dengan aset tetap berwujud lainnya. Sedangkan jenis *non-operational heritage assets* dikapitalisasi dengan cara: jika ada pasar aset sejenis, dinilai pada masa yang lebih rendah; dan jika tidak terdapat pasar, maka dinilai menggunakan biaya penggantian kecuali jika aset bersejarah tersebut tidak akan dibangun kembali secara fisik maka nilainya nol (Agustini dan Putra, 2011). New Zealand mencatat aset bersejarahnya pada harga perolehan dan menggunakan

penilaian berdasarkan pada nilai wajar aset tersebut. Prosedur yang digunakan sebagai berikut (Agustini dan Putra, 2011):

- a. Jika terdapat pasar aktif untuk aset yang sama atau aset yang serupa ada, maka nilai wajar akan ditentukan dengan referensi harga pasar (*market price*);
- b. Jika pasar aktif tidak ada, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti yang didasarkan pasar (*market based evidence*); dan
- c. Jika nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal dengan menggunakan bukti-bukti yang didasarkan pasar, maka estimasi nilai wajar ditentukan dengan menggunakan biaya penggantian yang didepresiasi (*depreciated replacement cost*).

Berdasarkan beberapa metode pengukuran masing-masing negara dapat disimpulkan bahwa, aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal maka dapat diakui di neraca dengan mendeteksi cara perolehan aset bersejarah tersebut. Penentuan kos secara andal dapat dilakukan baik melalui biaya perolehan, nilai wajar, maupun melalui lelang jika tidak ada pasar aktif. Namun, jika tidak terdapat metode pengukuran yang tepat maka tidak boleh diakui di neraca dan cukup disertakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan karakteristik kualitatif.

3. Penilaian (*Valuation*)

Penilaian merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos saat dilaporkan dalam laporan keuangan (Suwardjono, 2016:134). Setelah proses pengakuan dan pengukuran awal, suatu elemen atau pos

bisa saja mengalami perubahan nilai. Perubahan yang terjadi bisa menyebabkan pertambahan nilai maupun penurunan nilai yang mengharuskan adanya penyusutan, hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan, bencana dan lain sebagainya. Basis penilaian yang sesuai merepresentasikan atribut pos-pos yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan.

Berdasarkan pada SAP No. 07 tahun 2010 penilaian awal aset tetap yang memenuhi klasifikasi barang berwujud harus diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila aset diperoleh tanpa nilai maka biaya aset tersebut sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sedangkan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Adapun pada FRS 30 UK membebaskan memilih metode penilaian yang sesuai dan relevan untuk aset tetap. Menurut IPSAS 17-*Property, Plant and Equipment* setelah proses pengakuan, aset yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal dilakukan revaluasi. Nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian. Jika nilai aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut di kredit langsung ke selisih penilaian kembali. Kenaikan dan penurunan nilai aset harus diakui dalam surplus/defisit.

Australia menilai aset bersejarah berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama masa penggunaan atau keberadaan aset bersejarah tersebut. Selain itu, Australia menerapkan metode depresiasi hanya untuk aset bersejarah yang memiliki masa manfaat terbatas. Di Inggris, penilaian aset bersejarah menggunakan metode mana yang lebih rendah antara biaya pengganti dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*lower of replacement cost and recoverable*

amount). Sedangkan New Zealand memperbolehkan melakukan penilaian kembali aset bersejarah dengan menggunakan nilai wajar, dengan prosedur sebagai berikut (Agustini dan Putra, 2011):

- a. Jika terdapat pasar aktif untuk aset yang sama maka harga pasarnya menjadi nilai wajarnya;
- b. Jika tidak terdapat pasar aktif maka nilai wajar tersebut harus ditentukan dengan menggunakan bukti yang didasarkan pada pasar lainnya (misalnya lelang); dan
- c. Namun, jika kedua hal tersebut tidak ada maka digunakan *depreciated replacement cost* (DRC).

Aset bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan dinilai berdasarkan atribut yang sesuai dengan cara perolehannya, apakah melalui pertukaran moneter atau bahkan melalui pertukaran non-moneter. Apabila aset bersejarah diperoleh melalui pertukaran moneter maka harga perolehan atau kos yang melekat pada aset bersejarah tersebut merupakan atribut yang paling relevan. Apabila diperoleh melalui pertukaran non-moneter seperti sumbangan, donasi, sitaan, temuan dan lain sebagainya maka akan sulit untuk menentukan atribut penilaiannya, maka dapat digunakan atribut pengukuran dengan nilai wajar (Agustini dan Putra, 2011).

Indonesia sendiri, melakukan penilaian terhadap aset bersejarah dengan adanya penyusutan. Aset bersejarah yang termasuk aset tetap disusutkan berdasarkan karakteristik dari aset tersebut. Metode penyusutan yang digunakan harus menggambarkan manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir ke

pemerintah. Adapun metode penyusutan berdasarkan SAP NO. 07 tahun 2010 sebagai berikut: metode garis lurus (*straight line method*); metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); dan metode unit produksi (*unit of production method*). Menurut Agustini dan Putra (2011) semua aset bersejarah yang dapat diukur baik yang berfungsi sebagai *operational heritage assets* maupun *non-operational heritage assets* (misalnya tanah dan bangunan bersejarah) seharusnya dilakukan penyusutan. Jika tidak diperoleh estimasi yang terbaik, maka informasi mengenai alasan ketidakmampuan memperoleh penilaian yang andal dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Penyajian dan Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan merupakan tahap akhir dari proses pengakuan, pengukuran dan penilaian. Pengungkapan meliputi penyajian informasi akuntansi dalam seperangkat penuh laporan keuangan. Sistem informasi aset warisan harus menyediakan informasi deskriptif mengenai informasi non-finansial yang berkaitan dengan tujuan dan tanggung jawab entitas yang memegang aset, sifat dan karakteristik aset bersejarah yang dimiliki, kondisi fisik, pekerjaan restorasi yang diperlukan, jumlah pengunjung dan lain sebagainya. Semua informasi ini harus dicatat terpisah sebagai informasi penunjang tambahan (Barton, 2000).

Berdasarkan praktik pengakuan, pengukuran dan penilaian aset bersejarah di negara-negara yang telah dibahas sebelumnya, memiliki praktik masing-masing yang berdampak pada pengungkapan yang akan berbeda pula. Australia mengakui aset bersejarah yang memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap dengan kategori *Property, Plant and Equipment* dalam seksi *Heritage and Community Assets* dan

diungkapkan secara terpisah dalam catatan *property, plant and equipment*. Apabila tidak diakui sebagai aset, maka aset bersejarah diakui dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup deskripsi item, alasan tidak mengakui item, jumlah perolehan item, dan jumlah pelepasan item selama tahun yang bersangkutan. Sementara Inggris, aset bersejarah yang dapat dikapitalisasi baik jenis *operational heritage assets* maupun *non-operational heritage assets* disajikan dalam *tangible fixed assets* sesuai kategori masing-masing. Sedangkan aset bersejarah yang tidak dikapitalisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan rincian umur dan skala aset serta bagaimana perolehan dan penggunaan aset tersebut. New Zealand menyajikan aset bersejarahnya di neraca dengan klasifikasi PPE sesuai dengan kategori dan tidak disajikan dengan judul *cultural dan heritage assets*. Sedangkan untuk koleksi lainnya di catat sebagai *other assets* (Agustini dan Putra, 2011).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 tahun 2010 paragraf 66, tidak mengharuskan untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jenis *operational heritage assets* disajikan di neraca seperti halnya aset tetap lainnya, dan untuk aset bersejarah yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap disajikan dalam CaLK dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

I. Rerangka Pikir

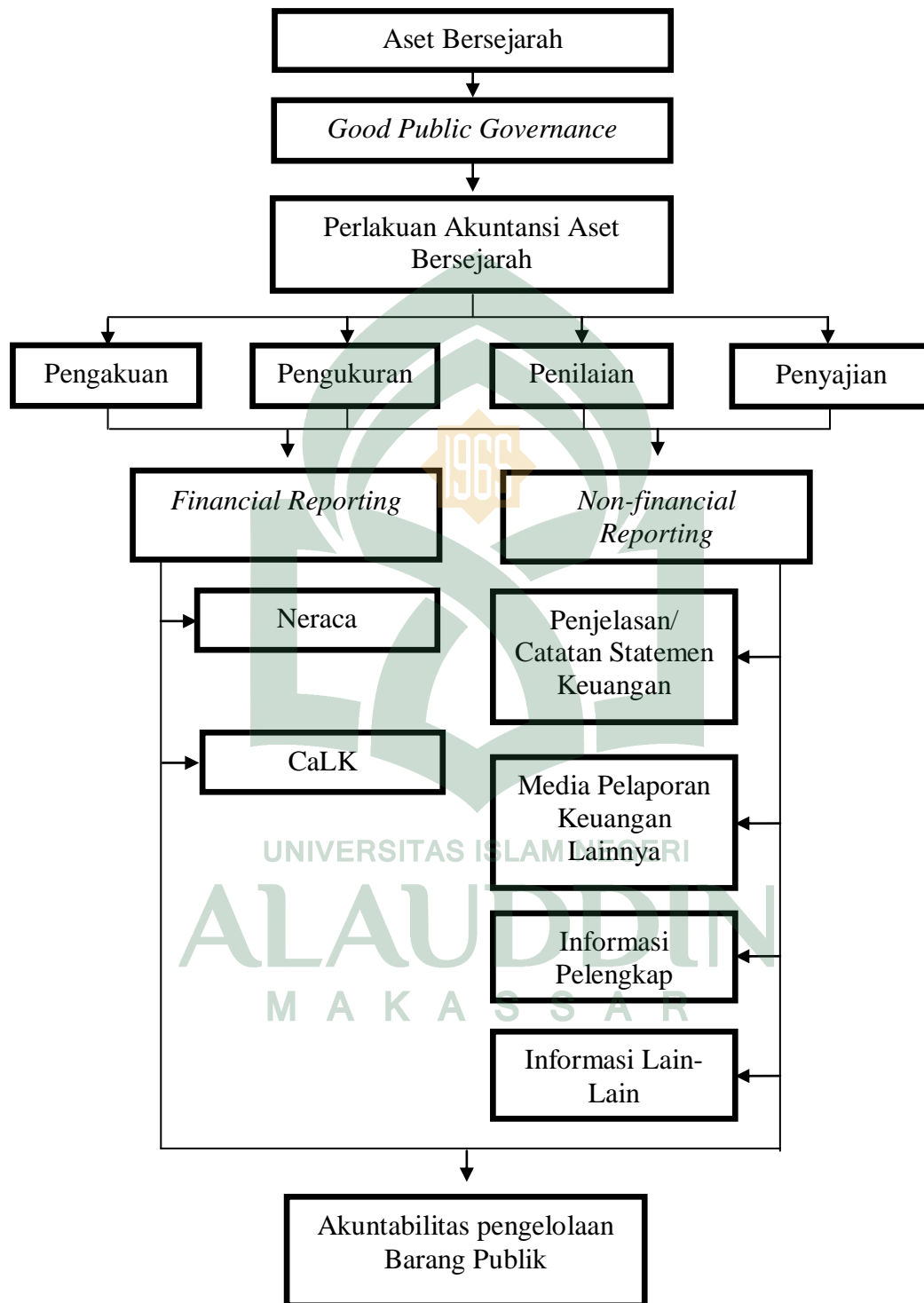
Aset bersejarah merupakan salah satu barang publik yang harus dijaga kelestariannya karena sarat akan nilai budaya, sosial, maupun pendidikan. Saat ini

yang menjadi permasalahan aset bersejarah yaitu terkait dengan perlakuan akuntansinya. Sulitnya mengkapitalisasi jenis aset ini menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan pencatatan akuntansi yang sesuai. Meskipun telah ada standar yang mengatur seperti FRS UK 30, IPSAS 17, dan di Indonesia sendiri pada SAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap namun setiap standar tersebut memiliki cara yang berbeda dalam pencatatan aset bersejarah.

Penelitian ini mencoba membahas aset bersejarah dan bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian yang sesuai berdasarkan pada konsep *Good Public Governance* (GPG) yang dimana terdapat beberapa asas seperti asas demokrasi, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas budaya hukum, serta asas kesetaraan dan kewajaran. Melalui perlakuan akuntansi yang sesuai maka akan menghasilkan pengungkapan yang bukan hanya terkait aspek kuantitatif dalam bentuk *financial reporting*, namun juga mengenai aspek kualitatif dalam bentuk *non-financial reporting*, sehingga akan lebih meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan aset bersejarah yang merupakan salah satu barang publik dan aset berharga bagi negara. Adapun rerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1

Rerangka Pikir



Sumber: Data diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Samsudin (2006:188) dalam Mahlel dkk (2016) penelitian kualitatif merupakan semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data manusia yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna. Paranoan (2015) metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan disebut juga sebagai metode *ethnography*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data pada salah satu museum, yaitu Museum Lapawawoi yang berlokasi di Jl. MH Thamrin No. 09, Tanete Riattang, Manurunge Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada paradigma interpretif. Paradigma ini lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol (dalam hal ini adalah akuntansi) (Paranoan, 2015). Tugas dari teori ini adalah memaknai jadi bukan *to explain*. Paradigma interpretif memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada level pengalaman subjektif seseorang, dengan

kata lain paradigma ini mencari penjelasan dalam realisme tentang subjektivitas dan kesadaran individu, dalam kerangka acuan mengenai partisipan berhadapan dengan peneliti mengenai tindakan.

Penelitian yang menggunakan paradigma ini bertujuan untuk menafsirkan dunia, memahami kehidupan sosial, menekankan pada makna dan pemahaman. Dari segi sifat akuntansi, akuntansi adalah sesuatu yang subjektif, ada dalam pikiran manusia, dan diciptakan dari hasil pemikiran manusia. Akuntansi juga tidak bebas nilai, selalu ada nilai (kepentingan) sesuai dengan konteks sosial (Paranoan, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Nurhayati (2015) dengan fenomenologi penelitian di bidang akuntansi dapat merefleksikan pengalaman peneliti dalam melihat realitas sosial akuntansi, sejauh mana pengalaman tersebut secara intensif masih berhubungan dengan suatu objek yang ditelitinya. Fenomenologi sendiri berusaha melihat struktur yang implisit menjadi implisit dan memaknai pengalaman seseorang. Metode ini ditujukan untuk menggambarkan elemen yang mendasar dalam fenomena untuk mengungkap esensi universal yang mendasari kesadaran manusia.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti misalnya informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan referensi lainnya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data, yaitu dengan melakukan survei terhadap suatu objek secara langsung sebagai instrumen penelitian. Survei dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik dari objek penelitian untuk menjawab pertanyaan terkait dengan hal yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data melalui catatan-catatan penting dan relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, sah, serta akurat. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

4. *Internet Searching*

Internet searching merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin, dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis (Bungin, 2011:128).

E. *Instrumen Penelitian*

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Paranoan, 2015). Penelitian yang menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka, peneliti juga menggunakan alat penunjang seperti alat perekam suara, kamera dan alat tulis.

F. *Tahapan Penelitian dan Analisis Data*

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data (Basrowi dan Suwandi, 2008). Proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan dengan mencari data yang benar-benar valid, sehingga ketika peneliti menyangsikan data yang diperoleh, maka akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa lebih mengetahui.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan beberapa informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambil tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan hal-hal serupa ke dalam kategori yang sama. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi tidak hanya dilakukan pada akhir penelitian, tetapi juga berlangsung pada saat proses penelitian. Proses ini dilakukan dengan membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan, kemudian melakukan kajian beruang terhadap data yang ada. Selanjutnya melaporkan hasil penelitian yang baru bersama dengan temuan yang sudah ada.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, validitas lebih merupakan tujuan bukan hasil, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan atau dianggap biasa saja (Bachri, 2010).

Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif akan lebih akurat jika menggunakan teknik triangulasi dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi; membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada (Bachri, 2010).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Museum La Pawawoi

Museum La Pawawoi terletak di Jl. M. H Thamrin No.09, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas bangunan 540 m², dengan hanya satu tingkat, berlantai tegel, berdinding tembok, daun pintu dan jendela terbuat dari kayu serta kaca. Bagian depan terdapat timpalaja bersusun lima yang menandakan penghuni bangunan ini adalah seorang raja. Museum La Pawawoi menempati bangunan bekas istana Raja Bone ke-32 yaitu A. Mappanyukki. Ruangan museum terdiri atas ruang depan (ruang tamu), ruang tengah (ruang keluarga), dan dua kamar tidur dan di belakang merupakan dapur. Istana ini semula dipergunakan sebagai tempat tinggal dan tempat bermusyawarah.

Jumlah koleksi yang dimiliki oleh Museum La Pawawoi kurang lebih 331 buah, terdiri dari peralatan dapur, pakaian adat, dan senjata. Terdapat juga koleksi berupa keramik yang sebagian besar merupakan peralatan makan raja-raja Bone. Di museum ini juga dipamerkan stempel kerajaan Bone serta miniatur perahu phinisi, dan yang tak kalah penting yaitu koleksi silsilah kerajaan Bone dari awal hingga akhir

1. Sejarah Museum La Pawawoi

Sebelumnya Museum La Pawawoi merupakan sebuah istana yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1929 dan ditempati oleh Raja Bone terakhir A. Mappanyukki yang dilantik pada tahun 1931. Istana ini dipergunakan oleh A.

Mappanyukki kurang lebih 5 tahun. Setelah belanda meninggalkan Bone, Rumah Kontrul Belanda yang sekarang menjadi Rumah Jabatan ditempati oleh Raja Bone, A. Mappanyukki. Setelah sepeninggal A. Mappanyukki yang pindah tempat ke Rumah Jabatan, istana raja Bone dialih fungsikan menjadi kantor POM Polisi Militer yang kemudian dialih fungsikan lagi menjadi kantor pengadilan. Pada tahun 1979 barulah gedung ini difungsikan menjadi museum dan dinamakan menjadi Museum La Pawawoi.

Lapawawoi sendiri adalah seorang Raja Bone yang ke-31 sebelum A. Mappanyukki, nama beliau dijadikan sebagai nama museum karena La Pawawoi dikenal pada masa peristiwa *Rumpa'na* Bone dimana pada tahun 1965 Belanda masuk dan menjajah kerajaan Bone dan beliau ditangkap dan diasingkan di Jawa, tepatnya di Bandung. La Pawawoi wafat dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibatas. La Pawawoi merupakan raja Bone yang pertama kali dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional dan menjadi salah satu tokoh kebanggaan orang Bone, sehingga itulah mengapa nama La Pawawoi dijadikan sebagai nama museum pada tahun 1979. Museum La Pawawoi sendiri diresmikan pada tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daud Yusuf. Pada tahun 1979, istana ini mengalami renovasi untuk pertama kalinya dan renovasi yang ke dua pada tahun 2014.

2. Profil Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone

Dinas Kebudayaan kabupaten Bone dibentuk atas dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Bone Nomor 56 tahun 2016 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone, Peraturan Bupati Bone nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan. Merupakan unsur pelaksana dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a. Susunan Organisasi

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bone No.80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan pasal 3, berikut susunan organisasi Dinas Kebudayaan kabupaten Bone terdiri dari:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat dinas, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang adat dan tradisi, terdiri atas:
 - a. Seksi Adat Istiadat
 - b. Seksi Pembinaan Tradisi
4. Bidang sejarah purbakala dan cagar budaya, terdiri atas:
 - a. Seksi Nilai Sejarah
 - b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya
 - c. Seksi Permuseuman
5. Bidang dokumentasi dan promosi budaya, terdiri atas:
 - a. Seksi Dokumentasi dan Promosi Budaya

- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- c. Seksi Promosi Budaya
- 6. Bidang kesenian, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesenian Tradisional dan Kontemporer
 - b. Seksi Pembinaan Kesenian
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan
- 7. UPTD
- 8. Kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

b. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bone No.80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan pasal 4, berikut tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan kabupaten Bone:

- 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di Bidang Kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan. Sekretaris dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kebudayaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Kebudayaan;
 - d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja pada kepala dinas;
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
 - c. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - d. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
 - e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya;
 - g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/ perlengkapan/asset;
 - h. Melaksanakan pembinaan staf; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
- 2) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja;
 - b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Kebudayaan;
 - c. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi kebudayaan;
 - d. Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Kebudayaan;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
 - h. Membuat rencana kerja tahunan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
- 3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan

dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- d. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. Bidang Adat dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Bidang Adat dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan inventarisasi budaya adat istiadat, tradisi masyarakat, menggali dan melestarikan budaya sesuai fakta sejarah, melakukan pembinaan dan penyuluhan serta

koordinasi dengan lembaga adat. Bidang adat dan tradisi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan bidang adat dan tradisi;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan di bidang adat dan tradisi;
- c. Penginventarisasi budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat;
- d. Penggalan peninggalan budaya dan adat istiadat sesuai fakta sejarah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan warisan budaya, pelestarian adat istiadat dan tradisi;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan lembaga adat dalam pengembangan budaya dan istiadat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Adat dan Tradisi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Adat Istiadat dipimpin oleh Kepala Seksi Adat Istiadat yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan bidang adat istiadat dan tradisi;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan bidang adat istiadat dan tradisi;
- c. Menginventarisasi budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat;
- d. Menggali peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi sesuai fakta sejarah;

- e. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan warisan budaya daerah, pelestarian adat istiadat dan tradisi masyarakat;
 - f. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang adat istiadat dan tradisi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang adat dan tradisi terkait tugasnya.
- 2) Seksi Pembinaan Adat Istiadat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Adat Istiadat yang mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan pembinaan adat istiadat;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan adat istiadat;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelestarian adat istiadat;
 - d. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembinaan adat istiadat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang adat dan tradisi terkait tugasnya.
- 3) Seksi Pembinaan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Tradisi yang mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan dalam pembinaan tradisi;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan tradisi;

- c. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelestarian tradisi;
 - d. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembinaan tradisi; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang adat dan tradisi terkait tugasnya.
4. Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang sejarah purbakala dan cagar budaya serta permuseuman. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan data dan informasi nilai sejarah purbakala cagar budaya dan permuseuman;
 - b. Perumusan kebijaksanaan data dan informasi Bidang Sejarah Purbakala dan cagar Budaya serta Permuseuman;
 - c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengembangan, pengawasan, dan Pengendalian, pemeliharaan nilai sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman;
 - d. Penyiapan tenaga teknis melalui pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam pelestarian nilai sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman;
 - e. Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan nilai sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

1) Seksi Nilai Sejarah Purbakala dipimpin oleh Kepala Seksi nilai Sejarah Purbakala mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan merumuskan data informasi dalam pengembangan nilai sejarah dan purbakala;
- b. Mengkaji ulang bahan pustaka sejarah purbakal dalam penyusunan sejarah lokal/daerah;
- c. Melestarikan dan memelihara warisan benda-benda bersejarah;
- d. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sejarah purbakala; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang nilai sejarah purbakala dan cagar budaya terkait tugasnya.

2) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan merumuskan data dan informasi pelestarian cagar budaya;
- b. Melestarikan, melindungi, dan memelihara kawasan, benda-benda, situs cagar budaya;
- c. Melaksanakan pendaftaran, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi cagar budaya;
- d. Melaksanakan analisis dampak lingkungan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya;

- e. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan permuseuman; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sejarah purbakala dan cagar budaya terkait tugasnya.
- 3) Seksi Permuseuman dipimpin oleh Kepala Seksi Permuseuman yang mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan data dan informasi permuseuman;
 - b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam pemeliharaan dan pelestarian permuseuman;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan permuseuman;
 - d. Menyiapkan tenaga teknis dalam pengelolaan permuseuman;
 - e. Memonitoring, mengevaluasi menyusun dan mengolah data dan informasi bidang museum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sejarah purbakala dan cagar budaya terkait tugasnya.
5. Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di Bidang dokumentasi dan promosi budaya. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan dan perumusan bahan informasi data base/profile budaya;

- b. Pelaksanaan kebijakan penyusunan pendokumentasian data base/profile budaya daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi peningkatan kemitraan kerjasama dengan lembaga/stakeholder dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat, tradisi dan seni budaya;
 - d. Pemberian rekomendasi teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan pelestarian adat, istiadat tradisi dan seni budaya;
 - e. Penyiapan bahan promosi budaya meliputi liflet dan booklet;
 - f. Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam festival seni budaya ditingkat regional, nasional dan internasional sebagai promosi budaya daerah;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendokumentasian data base/ profile budaya, pengoordinasian dan promosi budaya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Budaya mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan informasi data base/profile budaya dalam penyusunan pendokumentasian;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan penyusunan pendokumentasian data base/profile budaya daerah meliputi atraksi seni, nilai

sejarah purbakala, cagar budaya, adat dan tradisi serta seni pertunjukan;

- c. Memonitoring, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan pendokumentasian data base/profile budaya daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dokumentasi dan promosi budaya terkait tugasnya.

2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan merumuskan bahan koordinasi dengan lembaga, stakeholder, organisasi seni dalam pelaksanaan pelestarian adat istiadat, tradisi dan seni budaya;
- b. Melaksanakan koordinasi peningkatan kemitraan dan kerjasama lembaga, stakeholder organisasi seni dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat, tradisi dan seni budaya;
- c. Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan pelestarian adat istiadat, tradisi dan seni budaya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada kelompok dan pelaku seni dalam upaya pengembangan dan pelestarian adat istiadat, tradisi dan seni budaya;
- e. Memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pengoordinasian antar lembaga dalam upaya pengembangan dan pelestarian adat istiadat, tradisi dan seni budaya; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dokumentasi dan promosi budaya terkait tugasnya.
- 3) Seksi Promosi Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi Budaya yang mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan menginventarisir potensi kekayaan budaya daerah;
 - b. Menyiapkan bahan promosi budaya dalam bentuk liflet dan booklet;
 - c. Menyelenggarakan dan keikutsertaan dalam festival seni budaya tingkat regional, nasional, dan internasional sebagai promosi budaya daerah;
 - d. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan promosi budaya; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya terkait tugasnya.
6. Bidang Kesenian dipimpin oleh Kepala Bidang Kesenian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi di Bidang Kesenian. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan data dan informasi seni tradisional dan kontemporer;
 - b. Pendataan organisasi kesenian dan penerbitan nomor induk organisasi kesenian;

- c. Pelaksanaan dan perumusan pengkajian seni tradisional dan kontemporer;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan festival seni tradisional dan kontemporer;
 - e. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan organisasi kesenian melalui pelatihan;
 - f. Penyiapan data dan perumusan rencana sarana dan prasarana gedung seni pertunjukan;
 - g. Pemberian dukungan dan fasilitasi dalam penggunaan sarana dan prasarana pertunjukan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengkajian seni tradisional, penyelenggaraan festival, pengelolaan organisasi kesenian serta perumusan rencana sarana dan prasaran gedung seni pertunjukan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Kesenian Tradisional dan Kontemporer dipimpin oleh Kepala Seksi Kesenian Tradisional dan Kontemporer mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan data dan informasi seni tradisional dan kontemporer;
 - b. Melaksanakan pendataan organisasi kesenian dan pelaku seni;

- c. Mengidentifikasi dan merumuskan penerbitan nomor induk kesenian;
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan festival seni tradisional dan kontemporer;
 - e. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendataan organisasi kesenian, pengkajian dan penyelenggaraan seni tradisional dan kontemporer; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesenian terkait tugasnya.
- 2) Seksi Pembinaan Kesenian dipimpin Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan dan merumuskan kebijaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan organisasi kesenian;
 - b. Melaksanakan pembinaan pengelolaan organisasi kesenian;
 - c. Melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan seni tradisional dan kontemporer;
 - d. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan dan pengelolaan seni tradisional dan kontemporer; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesenian terkait tugasnya.
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menginventarisir data sarana prasarana seni pertunjukan;
 - b. Menyusun dan merumuskan rencana sarana prasarana gedung seni pertunjukan;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan rencana sarana prasarana gedung seni pertunjukan;
 - d. Melaksanakan pembenahan dan pemanfaatan sarana prasarana gedung seni pertunjukan;
 - e. Memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan kesenian melalui penggunaan sarana prasarana seni peertunjukan;
 - f. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penggunaan, pembenahan dan pemanfaatan sarana prasarana seni pertunjukan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesenian terkait tugasnya.
7. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurus.
8. Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Berdasarkan Good Public Governance

a. Pengakuan

Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statemen keuangan (Suwardjono, 195:2005). Tolak ukur dari suatu pengakuan adalah adanya kriteria. FASB menetapkan empat kriteria pengakuan, seperti definisi; keterukuran; keberpautan; dan keterandalan. Kriteria-kriteria tersebut menjadi pembatas pengakuan suatu pos atau elemen keuangan.

SAP 07 tahun 2010 paragraf 15 disebutkan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh entitas dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria, berwujud; memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

1) Memiliki Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap memiliki manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan

yang dapat diberikan oleh aset tetap, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah (SAP no.07 par 16). Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas masa depan.

Pemanfaatan aset bersejarah secara ketat diatur dalam undang-undang dan dibatasi pada kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Hal ini juga disebutkan oleh bapak Andi Reski Arbiansyah, sebagai berikut:

“Aset bersejarah merupakan aset yang dilindungi oleh Undang-Undang yang sarat akan nilai budaya serta pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mendanainya.”

Yang perlu digaris bawahi dari pemaparan bapak Andi Reski Arbiansyah bahwa aset bersejarah sarat akan nilai budaya dan karena nilai budaya inilah sehingga pemerintah berkepentingan untuk menjaganya. Aset bersejarah diakui karena adanya potensi layanan yang dapat diterima oleh entitas, karena sejatinya aset bersejarah memang tidak dimaksudkan untuk kegiatan ekonomi atau sebagai penghasil arus kas masuk. Disediakan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat dan secara gratis, oleh karena itu tidak ada keuntungan yang diperoleh entitas pengelola. Seperti yang diungkapkan bapak Andi Baso Bone Mappasiss sebagai berikut:

“Itu karcisnya pernah saya tanyakan di Direktorat Permuseuman dibawah naungan Dirjen Kebudayaan pernah menjelaskan ke kepala museum nasional bahwa untuk pengadaan retribusi untuk museum sebenarnya tidak layak dibenarkan karena museum untuk

edukasi. Adapun penggunaan retribusi hanya mengatur arus pengunjung jika daya tampung museum itu tidak sesuai dalam artian lebih kecil daripada jumlah pengunjung yang masuk, jadi untuk mengatur supaya pengunjung itu bisa memenuhi dan bisa masuk ke museum itu maka diberlakukanlah retribusi supaya pengunjung ini jangan keluar masuk, satu kali masuk, keluar, yah jangan masuk lagi dan memberikan kesempatan pada yang dibelakang yang ingin masuk. Nah itu gunanya retribusi untuk museum, beda kalau dibioskop atau apa, begitu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengenaan karcis atau retribusi untuk memasuki museum tidak layak untuk dilakukan. Museum La Pawawoi sendiri tidak memberlakukan karcis atau retribusi, pengunjung mendapat akses secara gratis. Museum hanya mengandalkan sumbangan seadanya dari masyarakat untuk biaya pemeliharaan jadi bisa dikatakan tidak terdapat manfaat ekonomik yang diperoleh.

2) Biaya Perolehan Aset dapat Diukur dengan Andal

Biaya perolehan suatu aset tetap dapat diukur dengan andal ketika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian yang mengidentifikasikan biayanya. Bukti-bukti tersebut dijadikan dasar dalam menentukan biaya perolehan. Selain itu, mengidentifikasi cara perolehan aset tetap juga diperlukan.

Aset bersejarah yang notabene diperoleh melalui warisan dan donasi menyebabkan biaya perolehannya sulit untuk ditentukan, ditambah lagi dengan adanya batasan hukum yang melarang penjualan aset bersejarah sehingga tidak terdapat pasar sebagai acuan dalam menentukan biaya yang andal. Seperti pada benda-benda bersejarah milik Museum La

Pawawoi yang diwariskan dari raja-raja Bone sebelumnya tidak memungkinkan untuk menentukan biaya perolehan yang andal.

“Ada memang benda-benda peninggalan yang dimiliki oleh kerajaan pada masa itu termasuk stempel-stempel kerajaan, itukan sesuai masa pemerintahan yang dipegang oleh *Ade' Pitu* sebagai salah satu pusaka kerajaan Bone termasuk peninggalan raja Bone ke-2 Laummasa Petta Panrebessie. Itu menjadi sebuah pusaka *Arajang* yang memang dirawat dan dijaga oleh kerajaan pada masa itu secara turun temurun. Dan sebagian alat-alat diatas itu merupakan alat-alat pribadi dari Almarhum A. Mappasissi Petta Awampone yang memang mereka dimiliki secara turun temurun secara pribadi dan memang itu ditata bahkan ke pemerintahan di Museum Lapawawoi.”

Harga perolehan dari aset bersejarah yang diperoleh melalui warisan seperti pada kasus Museum La Pawawoi adalah sulit untuk diukur keandalannya. Penggunaan nilai wajar pun tidak akan memadai karena karakteristik yang dimiliki. Menurut Biondi dan Lapsley (2014) usaha untuk mengkapitalisasi aset bersejarah diruntuhkan oleh sifat-sifat dari aset ini.

3) Tidak Dimaksudkan untuk Dijual dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama pemerolehan aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan bukan untuk dijual. Aset tetap digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomik dan dimiliki dalam jangka panjang, namun ketika keadaan keuangan suatu entitas sedang buruk maka aset tetap tersebut bisa dijual untuk menopang atau menstabilkan arus kas entitas.

Aset bersejarah tidak untuk dijual dalam operasi normal entitas maupun dalam keadaan tidak normal karena adanya hukum atau peraturan

yang membatasi atau melarang pelepasannya untuk dijual. Hal tersebut juga berlaku bagi Museum La Pawawoi dimana menurut bapak Andi Baso Bone Mappasissi bahwa koleksi-koleksi yang terdapat dalam museum tidak untuk diperjual belikan.

“Kita memang tidak pernah memberikan harga dan tidak pernah berniat untuk menjual.”

Koleksi benda-benda bersejarah Museum La Pawawoi dimiliki untuk dimuseumkan saja dan tidak untuk diperjual belikan, karena memang sebagian besar merupakan koleksi pribadi raja-raja sebelumnya yang diwariskan secara turun temurun. Museum LaPawawoi diharapkan untuk dimiliki dalam waktu yang tidak terbatas agar generasi mendatang tetap bisa menikmatinya.

4) Diperoleh atau Dibangun dengan Maksud untuk Digunakan

Perolehan aset tetap harus didukung dengan bukti secara hukum. Pengakuan aset tetap akan andal jika terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaannya secara hukum, seperti adanya sertifikat. Adanya penguasaan yang sah terhadap suatu benda akan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya. Dalam artian, aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah atau negara dan memiliki bukti atas kepemilikan akan mencegah pengakuan atau klaim dari pihak lain.

Mengingat pentingnya aset bersejarah bagi suatu bangsa, maka bukti-bukti kepemilikan atau penguasaannya sangatlah penting. Museum La Pawawoi merupakan aset daerah dan sudah teregistrasi sebagai benda cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, namun

sebagian koleksi yang dimiliki merupakan milik pribadi pimpinan yang tak lain adalah keturunan langsung dari raja-raja Bone sebelumnya. Berbeda dengan aset bersejarah berupa tanah dan bangunan baik yang peruntukkan bagi kegiatan operasional pemerintah maupun disediakan untuk umum harus disertai dengan penetapan status penggunaan BMN bagi pihak pengelola sebagai perlindungan hukum.

Aset tetap diperoleh atau dibangun sejatinya memang digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan tujuan entitas. Terlepas apakah tujuan tersebut bersifat finansial maupun tujuan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan karakteristik aset bersejarah dimana dipertahankan untuk waktu yang lama. Senantiasa dilestarikan dan dijaga agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pembahasan sebelumnya disimpulkan bahwa aset bersejarah tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap. Aset tetap dan aset bersejarah memiliki karakteristik yang sangat berbeda, khususnya bagi Museum La Pawawoi. Aset bersejarah harus dibedakan dari aset tetap pemerintah sesuai dengan fungsinya. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga dan melestarikan aset bersejarah yang berada dibawah kendalinya, seperti yang diungkapkan oleh bapak Andi Baso Bone Mappasissi bahwa aset bersejarah merupakan aset daerah.

“Aset bersejarah masuk dalam kategori aset, dia aset daerah juga. Karena semua benda-benda itu sudah diserahkan ke pemerintahan termasuk aset pusaka, semua sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah khususnya secara umum aset secara nasional.”

Sejalan dengan Agustini dan Putra (2011) bahwa aset bersejarah seharusnya menjadi bagian dari aset pemerintah dan digunakan untuk pelayanan publik atau untuk kepentingan masyarakat. Terdapat kriteia-kriteria tertentu untuk dapat diakui sebagai aset bersejarah, sebagaimana disebutkan oleh ibu Nurdianti, sebagai berikut:

“Punya nilai sejarah, punya nilai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Intinya tiga itu. Jadi banyak bangunan yang umurnya 50 tahun. Kan kriteria awal itu berumur 50 tahun, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.”

Lebih lanjut, bapak Andi Reski Abriansyah menyebutkan bahwa:

“Aset bersejarah itu sendiri dapat diakui jika data-datanya lengkap, asal usul sejarahnya jelas, pemakainya siapa dan yang jelas sarat akan nilai. Terdapat kategori-kategori dan yang pasti kita tahu betul sejarah dari aset bersejarah tersebut. Terkait dengan registrasi aset bersejarah disini terdapat bagian tersendiri yang melakukan peregristrasian.”

Diakui sebagai aset bersejarah jika data-data terkait asal usul sejarahnya jelas. UU No. 11 tahun 2010 menetapkan kriteria suatu barang, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya jika, berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pengakuan aset bersejarah sebagai aset pemerintah secara tidak langsung memberi hak penguasaan sebagai pengelola. Dengan ditetapkannya suatu benda sebagai aset bersejarah maka yang menjadai fokus utama adalah bagaimana aset ini dapat dikelola semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Agar hal tersebut dapat tercapai dibutuhkan sinergi antara pihak

pengelola dan *stakeholder* untuk secara bersama-sama melestarikan aset bersejarah sebagai wujud kepedulian terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya.

b. Pengukuran

Pengukuran merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam sebuah transaksi. SAP 07 tahun 2010 paragraf 21 pengukuran dapat dikatakan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian yang mengidentifikasi biayanya. Aset bersejarah yang diperoleh melalui transaksi tanpa pertukaran seperti penerimaan dari donasi, dalam keadaan ini aset bersejarah diukur berdasarkan biayanya pada tanggal akuisisi (ASB, 2008). Meskipun demikian, terdapat kendala-kendala yang menyebabkan aset bersejarah sulit untuk diukur dalam hal keuangan, seperti yang di paparkan bapak Muh. Yunus sebagai berikut:

“Kendalanya karena pendapat orang-orang berbeda, tergantung penilaian orang berapa. Yang paham akan memberikan nilai yang tinggi namun sebaliknya bagi orang awam penilaiannya akan berbeda”

Penjelasan bapak Muh.Yunus terkait kendala yang dihadapi dalam menetapkan harga pada aset bersejarah mengindikasikan bahwa pengukuran nilai moneter terhadap aset bersejarah bukan sesuatu yang mudah, karena terdapat beragam persepsi. Para *stakeholder* memiliki kepentingan berbeda yang berakibat pada kebutuhan informasi yang berbeda pula. Kita tidak bisa asal mengcopy metode pengukuran yang biasa digunakan dalam sektor swasta, seperti yang dikutip dari Ellwood (2018) bahwa metode pengukuran yang biasa digunakan dalam praktik akuntansi tidak efisien diterapkan pada aset bersejarah.

“Kita tidak bisa menentukan nilai dari aset bersejarah karena ini berada pada ranah subjektif. Nilai-nilai sosial yang terkandung tidak bisa dipadankan dengan ukuran uang.”

Pernyataan yang dilontarkan bapak Muh.Yunus diperkuat oleh pernyataan bapak Andi Reski Ariansyah sebagai berikut:

“Aset bersejarah tidak dapat diberi harga, kita tidak akan bisa menghitung nilainya apalagi benda-benda bersejarah yang memiliki nilai spiritual.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mengukur atau menominalkan aset bersejarah tidak sepadan dengan nilai *intangible* yang terkandung. Makna dan filosofi dari aset bersejarah tidak berada pada ranah pengukuran, akan tetapi pada kepuasan pengguna atau penikmat dari aset bersejarah tersebut.

Museum La Pawawoi tidak melakukan pengukuran terhadap koleksinya, seperti yang di disebutkan oleh bapak Andi Baso Bone Mappasissi ketika diwawancarai terkait penilaian benda-benda bersejarah yang dimiliki museum La Pawawoi, bahwa:

“Tidak, karena memang disini untuk dimuseumkan saja....”

Lebih lanjut, beliau menambahkan:

“Kita memang tidak pernah memberikan harga dan tidak pernah berniat untuk menjual. Kecuali kolektor-kolektor, mereka punya nilai tersendiri, sebelumnya mereka sudah memahami bahwa di museum ini tidak ada barang yang diperjual belikan jadi mereka juga tidak menawar.”

Dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa benda-benda bersejarah atau aset bersejarah tidak diperuntukkan untuk diperjual belikan, terutama koleksi yang dimiliki oleh museum karena koleksi museum sendiri diperoleh dari warisan raja-raja Bone sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No.66 tahun 2015

bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya dengan masyarakat.

Pengukuran nilai ekonomik aset bersejarah menurut hemat penulis bukanlah sesuatu yang *urgent* dan mendesak, diperlukan banyak penelitian dan *survey*. Keterlibatan pemangku kepentingan terutama masyarakat adat merupakan langkah yang tepat untuk menentukan nilai yang sesuai karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih terkait sejarah-sejarah masa lampau.

c. Penilaian

Setelah proses pengakuan dan pengukuran awal, suatu elemen atau pos bisa saja mengalami perubahan nilai. Perubahan yang terjadi bisa menyebabkan penambahan nilai maupun penurunan nilai yang mengharuskan adanya penyusutan, biasanya disebabkan oleh kerusakan, bencana, dan lain sebagainya. Menurut Agustini dan Putra (2011) tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai.

SAP 07 tahun 2010 memberikan alternatif penilaian dimana aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan, dan apabila diperoleh dengan tanpa nilai maka menggunakan nilai wajar saat perolehan. Adapun *Act Accounting Policy* (2009) mengharuskan menerapkan model revaluasi terhadap aset bersejarah dan mengukur berdasarkan nilai wajar. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik akan tetapi memberikan manfaat yang sama. Namun, melakukan penilaian pada aset bersejarah merupakan hal yang sulit. Terdapat kendala berupa karakteristik aset bersejarah yang berbeda dengan

aset pada umumnya, terlebih lagi manfaat yang diperoleh dari melakukan penilaian tidak sebanding dengan kesulitan yang dihadapi. Berikut pengungkapan ibu Nurdianti:

“Aset bersejarah itu sulit dilakukan penilaian, karena nilainya sulit untuk diukur dengan satuan moneter. Harus ada tim penilai khusus untuk menilainya dan harus melibatkan tim ahli seperti para arkeolog. Disamping itu harus ada anggaran khusus untuk itu dan biasanya proses waktu penilaiannya itu memakan waktu yang cukup lama.”

Lebih lanjut, mengutip dari hasil wawancara dengan direktur Museum Canterbury, Anthony Wright dalam penelitian Hooper (2005) yang menyatakan:

“We are not against valuation per se, but our board policy is, it is a waste of time and effort for no realistic return. It is a very expensive exercise to undertake on a regular basis. The collections are held in trust for perpetuity, so we can never realise the valuations anyway”

Sejalan dengan Elwood dan Greenwood (2015) bahwa sejumlah pendekatan terhadap penilaian aset bersejarah tidak akan berhasil, seperti *historical cost*, *replacement cost*, *fair value*, dan *value in use* yang kesemuanya bermasalah dalam kaitannya dengan pengukuran aset bersejarah. Penggunaan *historical cost* tidak relevan untuk aset bersejarah yang diwariskan secara turun temurun, *replacement cost* tidak sesuai karena sebagian besar aset bersejarah tidak dapat diproduksi ulang, *fair value* yang mengasumsikan adanya pasar untuk aset yang sama atau serupa juga tidak memungkinkan karena ada batasan penjualan untuk aset bersejarah, sedangkan penggunaan *value in use* dirasa kurang tepat karena aset bersejarah disediakan oleh pemerintah secara gratis atau tersedia untuk umum.

Metode penilaian apapun tidak diterapkan pada Museum La Pawawoi, hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai wadah untuk melestarikan dan

mengkomunikasikan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat, Museum La Pawawoi juga bukan termasuk jenis *operational heritage assets* sehingga tidak diperlukan adanya penilaian. Sejalan dengan Hooper (2005) bahwa beberapa museum di New Zealand menolak menerapkan standar yang mengharuskan penilaian terhadap aset bersejarah.

Aspek *intangible* yang ditonjolkan oleh aset bersejarah seperti nilai budaya, pendidikan, sejarah, dan pariwisata merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur atau dinominalkan. Disamping itu, adanya hukum yang membatasi penjualan serta sulitnya mengestimasi masa manfaatnya bahkan mencapai ribuan tahun berbanding lurus dengan nilainya yang semakin bertambah. Aset bersejarah dipertahankan untuk waktu yang tidak terbatas, sehingga melakukan penyusutan terhadap aset bersejarah tidak dapat dilakukan, seperti pemaparan ibu Nurdianti:

“Kalau menurut ibu sih tidak perlu dilakukan penilaian, memang untuk beberapa pihak mengukur nilai uang itu kan sebenarnya untuk estimasi umur ekonomis kan, sedangkan aset bersejarah kita tidak bisa perkiraan umur ekonomisnya berapa. Nilainya pun berbanding terbalik dengan aset pada umumnya, semakin lama nilainya semakin meningkat.”

Sesuai dengan pernyataan Cowan dalam penelitian Hooper (2005) bahwa melakukan penyusutan terhadap aset bersejarah membuat pusing dan tidak akan berarti, bagaimana bisa kita merenungkan masa manfaat dari sebuah fosil misalnya yang sudah berusia ratusan tahun?. Adalah tidak wajar jika aset bersejarah disusutkan seperti aset tetap pada umumnya, sedangkan karakteristik keduanya berbeda.

d. Penyajian

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar cukup informatif. Aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan harus disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas sebesar nilai perolehan. Begitupun dengan aset bersejarah yang nilainya dapat diukur dengan andal.

SAP no.07 paragraf 64 tidak mengharuskan pemerintah menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Lebih lanjut pada paragraf 68 bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun pada *Financial Reporting Standard* (FRS) 30, aset bersejarah bersejarah dapat disajikan di neraca jika nilainya dapat ditentukan dan jika tidak alasan mengapa aset bersejarah tidak dilaporkan di neraca dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai berikut:

“Untuk aset bersejarah yang tidak dilaporkan di neraca, alasannya harus dijelaskan dan Catatan atas Laporan Keuangan harus menjelaskan makna dan sifat dari aset bersejarah yang tidak dilaporkan di neraca.”

Kedua standar tersebut pada dasarnya tidak menekankan keharusan untuk menyajikan aset bersejarah di neraca, namun harus disajikan dan diungkapkan secara rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat pilihan bagi entitas pengelola sehingga penyajian aset bersejarah menjadi beragam. Sebagai contoh, British Museum menyajikan aset bersejarah yang diperoleh setelah 1 April 2001 di neraca dalam akun *Heritage Assets* sebagai bagian dari *Fixed Assets*.

Sedangkan pada laporan keuangan UNESCO menyajikan aset bersejarah yang termasuk operational heritage assets dalam akun PP&E sebagai bagian dari *Non-Current Assets*.

Pencatatan pada Museum La Pawawoi sendiri hanya dilakukan secara pribadi oleh pimpinan museum, dengan alasan bahwa koleksi yang dimiliki museum sebagian milik pribadi serta diperoleh dari warisan dari raja-raja Bone sebelumnya dan bukan dari pengadaan oleh pemerintah daerah.

“Kalau dibeli secara pribadi itu hanya catatan pribadi kecuali kalau pemda yang beli itu dicatat oleh pemerintah daerah sendiri yang sekarang dibawah naungan Dinas Kebudayaan yang dulu dibawah naungan Dinas Pariwisata.”

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang menaungi museum tidak menyajikan aset bersejarah museum La Pawawoi dalam laporan keuangannya serta tidak pula melakukan pengungkapan. Sedangkan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan hanya melakukan inventarisasi sebagai situs budaya dengan nama ‘Istana Raja Bone’. Sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Nurdianti sebagai berikut:

“Pihak kami hanya melakukan inventarisasi berupa bentuk unit cagar budaya, dengan deskripsi ‘Istana Raja Bone’.”

Berikut potongan catatan inventarisasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan mengenai Museum La Pawawoi:

Tabel 3
Potongan Inventarisasi BPCB Sul-Sel

No. Inv	Nama Situs	Alamat	Jenis	Jumlah BCB	Tahun Berdiri
43	Istana Raja Bone	Jl. Bajoe, Menurunge, Tanete Riattang, Watampone, Sul-Sel	Bangunan	1 buah	1877

BPCB Sul-Sel tidak mengakui museum La Pawawoi sebagai aset dan tidak menyajikannya dalam laporan keuangan maupun dalam catatan BMN dengan alasan museum merupakan aset daerah dan memang tidak bisa untuk dikapitalisasi.

Menurut Barton (2000) meskipun penilaian terhadap aset bersejarah dapat dilakukan dengan andal, namun aset bersejarah bukan sumber daya yang dapat menghasilkan kas masuk untuk digunakan sebagai alat pembayaran utang, sehingga menyajikan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas akan sangat menyesatkan. Sebagaimana dikutip dari Suwardjono (225:2005) terkait fungsi neraca dan penilaian elemennya dimana neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki/dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam perioda-perioda berikutnya.

Menyajikan aset bersejarah di neraca dengan nilai ekonomik tanpa disertai pengungkapan yang memadai berpotensi menyesatkan bagi *stakeholder*. *Intangible value* dari aset bersejarah yang seharusnya memiliki nilai tidak terbatas akan dikesampingkan dengan pemberian nilai nominal. Kembali pada kegunaan dari aset bersejarah itu sendiri sebagai pengetahuan, pembelajaran sejarah dan pengetahuan untuk masyarakat maka penyajian di neraca dengan nilai nominal tidak mampu memenuhi tujuan keberadaan aset bersejarah. Sebagaimana dalam konsep *good public governance* dimana partisipasi masyarakat lebih diutamakan maka hendaknya dilakukan pengungkapan lebih demi keterpahaman informasi aset bersejarah yang disajikan.

2. Pengungkapan Aset Bersejarah Berdasarkan Good Public Governance

Pengungkapan menurut Suwardjono (134:2005) berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Informasi yang diungkapkan harus memenuhi kriteria kebermanfaatan (*usefulness*) yang biasa disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*). Meskipun suatu informasi memenuhi semua kualitas, tidak semua informasi tersebut bisa dilaporkan dalam statemen keuangan. Perlu untuk menyaring informasi mana yang dianggap penting untuk diakui atau tidak. Hal ini melibatkan pengukuran kuantitatif atau biasa disebut dengan materialitas. Dengan adanya penyaring tersebut maka dapat diidentifikasi informasi mana yang harus dilaporkan dalam statemen keuangan dan mana yang harus dilaporkan dengan cara lain.

FASB dalam Suwardjono (2005) memasukkan tujuan pelaporan organisasi nonbisnis dalam rerangka konseptual agar dapat dijadikan basis untuk mengidentifikasi pelaporan yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus/unik. Adapun tujuan utama pelaporan keuangan nonbisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut.

Informasi yang memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran dilaporkan dalam statemen keuangan seperti yang disyaratkan oleh rerangka konseptual, atau biasa disebut dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*). Adapun

pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh standar disebut dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela dapat berifat keuangan maupun nonkeuangan dan luas pengungkapannya tergantung pada pertimbangan manajemen.

a. *Mandatory Disclosure*

Pengungkapan yang disyaratkan dalam SAP no. 07 par 71 bahwa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Adapun untuk aset bersejarah yang potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, par 83 disebutkan bahwa aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud. Dengan melakukan pengungkapan sesuai dengan standar maka entitas pengelola sudah memenuhi kewajibannya yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan suatu negara dimana entitas berada.

ASB (2008) menentukan beberapa persyaratan pengungkapan yang harus dipenuhi oleh entitas pengelola aset bersejarah sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan entitas harus mengandung indikasi sifat dan skala aset bersejarah yang dimilikinya.
- 2) Laporan keuangan harus menetapkan kebijakan akuisisi, preservasi, manajemen, dan penghapusan. Termasuk sejauh mana akses ke aset bersejarah diizinkan.
- 3) Apabila entitas tidak melaporkan semua aset bersejarah di neraca, CaLK harus memberikan pemahaman yang jelas kepada pengguna

tentang signifikansi dan sifat dari aset tersebut yang tidak dilaporkan dalam neraca.

- 4) Dimana aset bersejarah di laporkan dalam neraca, berikut ini harus diungkapkan:
 - a. Nilai tercatat pada awal periode dan pada tanggal neraca, termasuk analisis antara aset-aset yang dilaporkan pada biaya dan penilaian.
 - b. Jika dilaporkan dengan penilaian, informasi yang cukup dalam membantu pemahaman tentang penilaian dan signifikansinya, termasuk:
 1. Tanggal penilaian;
 2. Metode penilaian;
 3. Dimana penilaian dilakukan oleh pihak eksternal, nama dan kualifikasi profesional, jika ada;
 4. Batasan signifikan dalam penilaian.
- 5) Informasi yang tersedia dan sangat membantu dalam penilaian aset-aset bersejarah yang tidak dilaporkan di neraca.
- 6) Laporan keuangan harus mencakup pengungkapan ringkasan transaksi aset bersejarah, untuk periode akuntansi dan beberapa periode sebelumnya:
 - a. Biaya akuisisi;
 - b. Nilai aset bersejarah yang diperoleh melalui donasi;
 - c. Hasil dari penghapusan aset;
 - d. Setiap penurunan nilai yang diakui pada periode berjalan.

- 7) Alasan tidak menilai aset bersejarah yang diperoleh dari donasi, termasuk sifat dan tingkat signifikansi sumbangan.

Merujuk pada persyaratan pengungkapan ASB tersebut mencerminkan usaha pembuat kebijakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset bersejarah.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Nurdianti selaku pembuat laporan BPCB Sul-Sel mengakui bahwa karena kendala penilaian sehingga tidak melakukan pengungkapan terhadap museum La Pawawoi. Bagi beliau cukup dengan melakukan inventarisasi untuk membuktikan keberadaan dan penguasaan aset tersebut.

“Kalau Museum La Pawawoi kita tidak diungkapkan dalam laporan keuangan BPCB karena itu merupakan aset daerah yah, dan itu memang tidak bisa dinilai. Nilainya suatu aset bersejarah tidak bisa kita tentukan berapa. Disini, kami hanya melakukan inventarisasi terkait item cagar budaya.”

Pernyataan ibu Nurdianti dibuktikan dengan Calk BMN yang hanya memuat dua jenis aset bersejarah yaitu berupa tanah dan bangunan bersejarah, sebagai berikut:

Gambar 2
Potongan atas Catatan Ringkasan BMN Berupa Aset Bersejarah BPCB
Sulsel Periode Tahun 2017

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan per 31 Desember 2017 adalah:

- Tanah untuk bangunan bersejarah lainnya dengan kuantitas 7 unit.
- Tanah untuk makam bersejarah dengan kuantitas 80.908m².

Sumber: BPCB Sulsel

Kondisi yang sama pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, dalam hasil wawancara dengan bapak Muh Yunus, sebagai berikut:

“Tidak, disini kami belum mengakui dan mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan. Untuk sementara kami dalam proses penggalian nilai-nilai sejarah pada aset bersejarah yang dimiliki daerah.”

Kendala pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan terletak pada proses penentuan nilai ekonomik yang hampir mustahil untuk dilakukan. Nilai-nilai sosial, sejarah dan budaya yang terkandung dalam aset bersejarah lebih mencerminkan nilai sesungguhnya dari aset tersebut. Terlebih untuk Museum La Pawawoi dimana pengadaannya melalui warisan, menyebabkan peniaian terhadapnya tidak bisa dilakukan dan semestinya hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan. Sebagai contoh sebagai berikut:

Gambar 3

Contoh Pengungkapan Museum La Pawawoi dalam CaLK

Aset Bersejarah

a. Museum La Pawawoi dengan kuantitas 1 buah

Museum ini menyimpan koleksi berupa benda-benda peninggalan raja-raja Bone yang sebagian besar diperoleh melalui warisan. Luas museum sekitar 540 m² yang berlokasi di Jl. M. H Thamrin No.09, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kurangnya informasi mengenai biaya dan penilaian, seperti kurangnya informasi tentang biaya pembelian dan kurangnya nilai pasar yang

sebanding menyebabkan Museum La Pawawoi tidak dapat diakui sebagai aset di neraca.

Sumber: data diolah

Pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dapat membuat pengungkapan *full disclosure* dengan menambahkan jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki Museum La Pawawoi, waktu perolehan dan informasi lain yang mendukung.

Ketika pimpinan museum La Pawawoi Andi Baso Bone Mappasissi ditanya mengenai pentingnya pengungkapan informasi terkait penilaian aset bersejarah. Beliau bertutur:

“Penting juga diketahui, karena sekarang kan serba ekonomi serba uang jadi penting juga kita ketahui. Mungkin walaupun nilai ekonominya itu nilai suatu bendanya kita bisa tau sehingga berapa besar nilainya itu mungkin bisa memicu sehingga kita bisa menjaga kenapa tidak, atau bisa lebih peduli karena persoalan nilai kenapa tidak. Apapun itu kita harus lakukan untuk lebih peduli terhadap ini, kalau persoalan nilai yang bisa memotivasi kita lebih peduli.. oke kita lakukan. Karena terkadang untuk sesuatu yang dianggap tidak bernilai sudah tidak dipedulikan tapi kalau dianggap bernilai wah dijaga bukan main kalau perlu dikawal polisi, kan begitu.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai ekonomik merupakan hal yang sangat penting. Apapun itu jika memiliki nilai rupiah yang tinggi akan memperoleh penghargaan dan perhatian yang tinggi pula. Apabila dengan melakukan penilaian akan membuat mereka lebih peduli terhadap keberadaan aset bersejarah tidak ada salahnya.

Pengguna utama dari pelaporan keuangan pemerintah bukanlah investor yang bertujuan untuk menerima keuntungan, melainkan wajib pajak dan para kontributor atau penyedia dana yang berkepentingan untuk menilai apakah pemerintah telah mengelola sumber daya publik dengan sesuai. Durie dalam Wild

(2013) berpandangan bahwa melaporkan ukuran finansial aset bersejarah tidak mencukupi untuk menyediakan informasi yang memadai bagi pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan tujuan budaya. *Stakeholder* yang beragam menjadikan tanggung jawab publik yang lebih luas, untuk itu dibutuhkan pengungkapan tambahan untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Voluntary Disclosures

Terbatasnya pengungkapan yang diwajibkan oleh standar berdampak pada adanya kebutuhan pengungkapan yang lebih luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai akuntabilitas memadai dalam pengelolaan aset bersejarah. Pengungkapan yang informatif akan memberikan nilai tambah terhadap entitas.

FASB menyatakan, meskipun laporan keuangan dan pelaporan keuangan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, beberapa informasi yang berguna lebih baik diungkapkan dalam laporan keuangan, dan beberapa lebih baik diungkapkan, atau hanya dapat diungkapkan melalui pengungkapan lain selain laporan keuangan. Melihat pada karakteristik aset bersejarah yang menonjol pada aspek sosial, seharusnya pengungkapan lebih dilakukan selain pada statemen keuangan.

Entitas pengelola aset bersejarah sebagai ikon budaya yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang memiliki tanggung jawab dalam penyebaran informasi, bukan hanya sebagai bentuk akuntabilitas akan tetapi sebagai pihak yang turut andil dalam mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan bapak Andi Baso Bone Mappasissi sebagai berikut:

“Kita butuh dukungan dan support dari semua pihak, dari semua elemen akan pentingnya sebuah budaya sebagai identitas budaya, dimana budaya merupakan sebuah aset atau ikon kebangsaan. Nah itu yang kita butuhkan, jadi butuh memang support dari pemerintah itu sendiri, pemerintah setempat utamanya untuk lebih giat mensosialisasikan sejarah budaya ini ke sekolah-sekolah. Mungkin seperti mengaktifkan kembali muatan lokal atau bahasa daerah, pengenalan sejarah supaya kita orang-orang Bone khususnya generasi Bone harus lebih memahami sejarah budaya itu sendiri dibanding budaya-budaya luar yang sekarang kita lebih banyak mengonsumsi budaya asing, kalau tidak untuk mencegah yah untuk mengimbangi. Setidaknya kita punya pondasi sendiri sebelum menyambut, sebelum mengonsumsi budaya luar.”

Pemerintah sebagai pemilik wewenang tertinggi terhadap aset bersejarah harus berperan aktif dalam penyebaran informasi budaya, bukan hanya melalui laporan keuangan namun melalui media lain yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat berbeda beda yang berdampak pada kebutuhan informasi yang berbeda pula. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan bapak Andi Baso Bone Mappasissi tersebut yang menekankan perlunya memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aset bersejarah melalui pendidikan di sekolah-sekolah sebagai upaya menanamkan kesadaran pada generasi penerus akan pentingnya kebudayaan.

Luasnya pengungkapan sukarela terkait pengelolaan aset bersejarah sangat penting untuk dilakukan. Akan tetapi dalam menentukan luasnya pengungkapan informasi tetap harus harus mempertimbangkan biaya dan manfaat, terutama pada museum berukuran kecil sering kali terkendala pada luas pengungkapan laporan tahunan (Wei dkk, 2008). Senada dengan pernyataan yang diberikan bapak Andi Reski Arbiansyah sebagai berikut:

“Memang agak sedikit informasi mengenai museum, entah apakah itu strategi kalau orang-orang ingin tahu tentang barang-barang di museum

bisa datang langsung ke museum ataukah bagaimana, saya sendiri kurang tau ...”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Andi Baso Bone Mappasissi sebagai berikut:

“Kalau persoalan informasi itukan tergantung siapa adminnya, bagaimana mereka mendapatkan informasi, seberapa besar upaya mereka untuk mendapatkan informasi. Jadi disini kita juga menunggu informasi apa yang mereka butuhkan dan itu yang kita berikan. Kita juga tidak tahu. Kalau memang pemerintah, dinas-dinas ini membuat sebuah website, website itu apa, arahnya kemana, apa saja yang dimuat disitu, apa yang mau dia informasikan. Kita tidak tau, jadi kita hanya menunggu kalau memang data-data di instansi kami dibutuhkan untuk di website itu kami siap memberikan.”

Pihak museum La Pawawoi mengandalkan pengungkapannya pada pemerintah dan dinas-dinas terkait. Adanya ketidaktahuan informasi apa saja yang perlu diungkap menjadi kendala. Kurangnya regulasi yang jelas berkontribusi pada permasalahan tersebut, dan juga inisiatif pemerintah dalam melakukan pengungkapan perlu ditingkatkan.

Pengungkapan informasi yang memadai berkaitan dengan keadilan sebagaimana dikelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



Terjemahan :

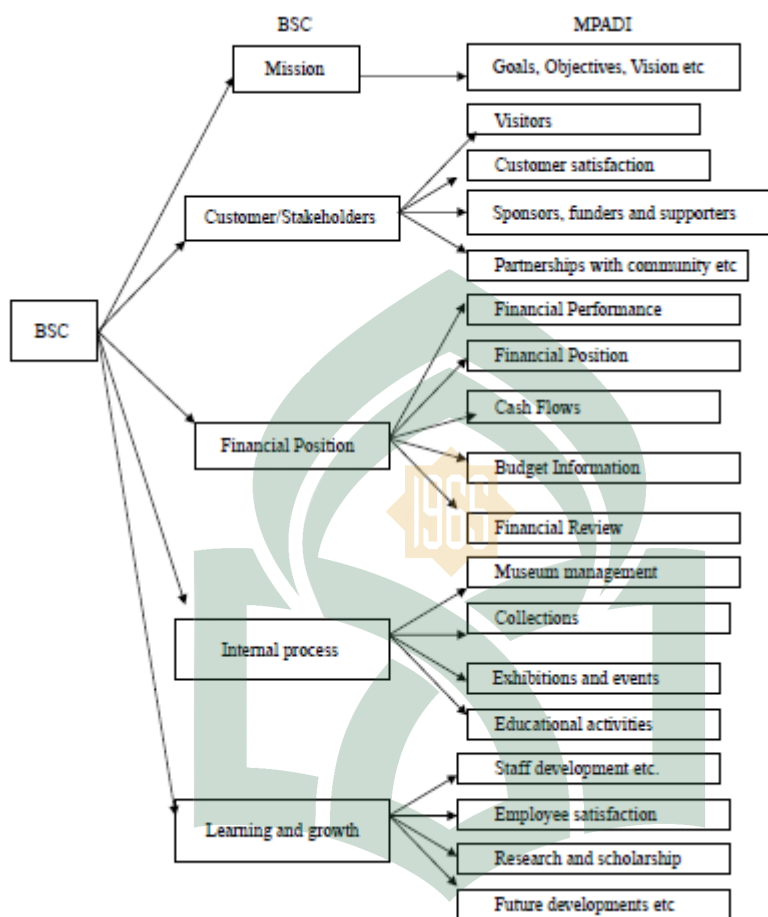
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menganjurkan kita untuk menjadi penegak keadilan semata-mata karena Allah SWT, bukan karena manusia atau sekedar mencari ketenaran. Keadilan sendiri dapat terwujud dengan terpenuhinya hak-hak sebagai manusia. HAM dalam Islam sendiri berprinsip pada kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia, derajat seorang manusia dimata Allah ditentukan oleh tingkat ketaqwaan. Entitas sebagai penyedia informasi senantiasa berpegang pada prinsip keadilan. Pengungkapan informasi aset bersejarah yang memadai merupakan bentuk keadilan kepada seluruh *stakeholder*.

Wei dkk (2008) menemukan bahwa museum yang berukuran besar melakukan pengungkapan lebih luas dibandingkan dengan museum berukuran lebih kecil, yang disebabkan museum besar memiliki *high profile* dan memperoleh pendanaan yang lebih besar dibandingkan museum kecil. Lebih lanjut, Wei dkk menghubungkan antara item BSC (*Balance Scorecard*) dan MPADI (*Museum Performance Accountability Disclosure Index*) untuk mengukur kualitas laporan tahunan museum di Inggris dan New Zealand.

Gambar 4
Hubungan Antara Item BSC dan MPADI



Sumber: Wei dkk (2018)

Penelitian tersebut mengidentifikasi item pengungkapan tertinggi terdiri atas: *sponsors, funders and supporters; partnership with community etc; financial performance; museum management*; dan *goals, objectives, vision etc*. Sedangkan pada item pengungkapan terendah terdiri dari: *employee satisfaction; budget information*; dan *costumer satisfaction*. Item-item pengungkapan dalam penelitian Wei dkk (2008) tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan luas

pengungkapan sukarela yang dapat dilakukan oleh entitas pengelola aset bersejarah.

Tabel 4
Daftar Pengungkapan Sukarela

Penjelasan/catatan statemen keuangan:
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan museum • Koleksi • Pameran dan kegiatan kebudayaan • Kegiatan edukasi
Media pelaporan keuangan lainnya:
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi anggaran
Informasi pelengkap:
<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan/sasaran, visi dan misi serta nilai • Jumlah pengunjung • Kepuasan pengunjung • Sponsor dan pemberi dana • Kerjasama dengan masyarakat atau komunitas lain
Informasi lain-lain:
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan staf • Kepuasan pegawai • Penelitian dan beasiswa • Rencana strategis jangka panjang

Sumber: Data diolah

Informasi tersebut dapat diungkapkan melalui media apapun, salah satunya adalah internet. Akan lebih efektif jika dinas terkait atau pihak museum sebagai pengelola aset bersejarah membuat *website* khusus sebagai media pengungkapan. Pengungkapan yang memadai dan menjangkau semua lapisan masyarakat menunjukkan keadilan dan kesetaraan, sehingga hak-hak para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi.

Kemudahan mengakses informasi terkait aset bersejarah merupakan salah satu indikator pencapaian akuntabilitas. Pengungkapan informasi deskriptif dan mudah dipahami oleh berbagai pihak lebih informatif daripada hanya diungkapkan dalam laporan keuangan. Masyarakat dan lebih khususnya komunitas adat menjadi prioritas utama. Sebagaimana negara demokrasi dimana rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap fungsi-fungsi dalam pemerintahan. Thamrin (2017) menyebutkan bahwa partisipasi warga yang efektif berarti membuka saluran informasi dimana mereka dapat menggunakan haknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

3. *Pertanggungjawaban Aset Bersejarah sebagai Barang Publik*

Penguasaan aset bersejarah bertujuan untuk melestarikan dan mempertahankan budaya bangsa, agar masyarakat lebih menghargai budaya. Sasaran utama dari pengadaan aset bersejarah adalah masyarakat luas, semua masyarakat memiliki hak untuk menikmati. Sebagaimana Barton (2000) menyebut aset bersejarah sebagai barang publik karena disediakan untuk

masyarakat tanpa diskriminasi, disediakan oleh publik dan pendanaannya berasal dari perpajakan.

Barang publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk publik/masyarakat secara umum tanpa masyarakat tersebut mengeluarkan biaya untuk dapat menikmatinya (Halim dan Kusufi, 142:2014). Barang publik dicirikan oleh atribut konsumsi yang tidak bersaing, pengguna individual tidak memperoleh hak kepemilikan pribadi. Barang-barang publik tersebut nyatanya tidak dapat disediakan secara memadai melalui penerapan kekuatan pasar. Penerapan praktik manajemen sektor privat menyebabkan sektor publik kehilangan orientasinya untuk bertanggung jawab pada kepentingan umum. Oleh karena itu, Kurniawan (2007) menyebutkan pentingnya konsep *governance* yang sekarang dalam sektor publik lebih dikenal dengan *good public governance* dimana lebih menekankan pada partisipasi publik. Konsep ini sesuai dengan tujuan pengadaan aset bersejarah yaitu untuk kepentingan sosial dan edukasi.

a. Demokrasi

Demokrasi bukan hanya berkaitan dengan ranah politik, akan tetapi dikenal pula dengan demokrasi ekonomi atau biasa disebut dengan demokrasi sosial yang bertalian pada kesejahteraan umum atau keadilan sosial (Manan dan Harijanti, 2014). Keberadaan aset bersejarah sebagai barang publik memiliki tujuan yang sama dengan demokrasi sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Agar pelayanan lebih maksimal dalam suatu museum diperlukan beberapa upaya agar hal tersebut tercapai, kurang lebihnya seperti yang dipaparkan oleh bapak Andi Reski Abriansyah sebagai berikut:

“Pengelolaan secara terus menerus dan sebaiknya disetiap bidang dalam suatu museum harus ada tenaga ahli seperti ahli pemeliharaan, adanya pengawasan yang memadai, tempat menyimpan benda-benda bersejarah harus selalu steril, dan antara pengunjung dan benda-benda bersejarah ada pembatas agar tidak tersentuh langsung.”

Pemaparan beliau terkait pengelolaan aset bersejarah merupakan suatu kondisi yang idealnya setiap museum memilikinya. Hal tersebut sangatlah penting demi menjamin keberlangsungan pelestarian dan perawatan aset bersejarah. Museum La Pawawoi hingga saat ini masih kekurangan sumber daya. Pimpinan museum sendiri yang melaksanakan semua fungsi yang ada dibantu oleh satu orang pengelola dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

Tingginya mutu pelayanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyedia jasa yang berakibat pada tingginya peran masyarakat dalam kegiatan pelayanan. Menurut Halim dan Kusufi (2014) tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan penegakan hukum (*law inforcement*). Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan-kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum (Nawawi, 2012). Pelaksanaan pemerintahan harus ditata oleh sistem hukum yang kuat dan memiliki kepastian, kepercayaan akan terbangun apabila terdapat penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Seharusnya dengan dikeluarkannya PP No.66 Tahun 2015 menjadi angin segar bagi manajemen museum. Akan tetapi praktik dilapangan lagi-lagi tidak sesuai peraturan yang ada. Terbukti dengan tidak

adanya tenaga ahli dan pengawasan yang memadai. Sesuai dengan apa yang diungkapkan bapak Andi Baso Bone Mappasissi sebagai berikut:

“Memang sudah ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu lebih baiknya. Biasanya disini ada rencana pemerintah untuk membentuk sebuah manajemen yang baru dengan skala nasional. Jadi ada Direktur Museum.”

Peraturan yang memadai tidak akan menjamin jika hukum tersebut tersebut tidak dilakukan sebagai mana mestinya, seperti pada pernyataan bapak Andi Reski Arbianyah ketika disinggung mengenai apakah peraturan yang ada terkait aset bersejarah telah memadai, sebagai berikut:

“Belum memadai. Tapi sebenarnya jika Undang-Undang tersebut benar-benar dilaksanakan maka sebenarnya cukup memadai. Seperti halnya masalah pendanaan pengelolaan aset bersejarah yang berasal dari pemerintah, tapi museum lapawawoi sampai sekarang tidak memperoleh dana dari pemerintah dan masi berbentuk swadaya yang pendanaannya berasal dari sumbangan masyarakat.”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi antara peraturan dengan praktik atau kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dalam peraturan dijelaskan mengenai pendanaan terhadap pengelolaan aset bersejarah salah satunya berasal dari pemerintah, namun sampai sekarang museum La Pawawoi sebagai pihak yang mengelola benda-benda bersejarah belum pernah mendapat kucuran dana dari pihak pemerintah. Untuk itu, penegakan hukum merupakan hal yang *urgent* dalam pengelolaan aset bersejarah.

Diterbitkannya UU no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjadi pegangan bagi pengelolaan benda-benda bersejarah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan cagar budaya harus melibatkan masyarakat dan pelestariannya sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini

cukup membuktikan bahwa aset bersejarah merupakan barang publik dan segala bentuk penilaian ekonomik terhadapnya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut.

c. Transparansi

Transparansi berarti masyarakat mampu mengakses informasi dengan mudah dan bebas terkait proses dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Nawawi (2012) transparansi juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses dengan mudah dan langsung, dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami oleh pengguna.

Penggambaran transparansi oleh bapak Andi Baso Bone Mappasissi melibatkan peran serta pemerintah, tentang bagaimana upaya pemerintah agar nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aset bersejarah dapat dipahami oleh masyarakat sebagai berikut:

“Nah itu yang kita butuhkan, jadi butuh memang support dari pemerintah itu sendiri, pemerintah setempat utamanya untuk lebih giat mensosialisasikan sejarah budaya ini ke sekolah-sekolah. Mungkin seperti mengaktifkan kembali muatan lokal atau bahasa daerah, pengenalan sejarah supaya kita orang-orang Bone khususnya generasi Bone harus lebih memahami sejarah budaya itu sendiri dibanding budaya-budaya luar yang sekarang kita lebih banyak mengonsumsi budaya asing, kalau tidak untuk mencegah yah untuk mengimbangi. Setidaknya kita punya pondasi sendiri sebelum menyambut, sebelum mengonsumsi budaya luar.”

Budaya bagi beliau semacam pondasi bagi generasi penerus bangsa agar tetap mempertahankan jati dirinya dari pengaruh budaya-budaya luar yang tengah berkembang. Sangatlah penting untuk menghargai budaya yang terkandung dalam

suatu aset bersejarah, sehingga informasi keuangan saja tidak akan cukup mewakili eksistensi aset bersejarah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Ilham sebagai berikut:

“Sekarang banyak situs-situs bersejarah yang dibiarkan terbengkalai dan bahkan masyarakat setempat menjualnya ke pihak luar. Itu semua disebabkan karna kurangnya pengetahuan masyarakat terkait warisan-warisan bersejarah dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat”

Mengakui aset bersejarah dengan nilai dan hanya melaporkannya dalam laporan keuangan pemerintah menjadikan informasi terkait aset tersebut menjadi tertutup dan susah untuk di akses bagi masyarakat. Hal ini disebabkan banyak dari instansi-instansi pemerintah yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya. Selain itu, meskipun laporan keuangan dipublikasi dan dapat diakses secara bebas, akan ada kendala pada keterpahaman masyarakat akan isi dari laporan keuangan tersebut. Dengan demikian transparansi hanya akan menjadi sekadar angan-angan.

Sebagai barang publik yang dipergunakan oleh masyarakat luas, informasi mengenai aset bersejarah harus sesuai dengan pengguna utamanya yaitu masyarakat. Akan lebih tepat jika informasinya disediakan melalui media selain laporan keuangan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hak masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara masyarakat dan organisasi. Akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi tapi merupakan milik dan hak masyarakat umum yang mempunyai hubungan dengan individu atau organisasi tersebut. Randa dan Daromes (2014) menyatakan konsep akuntabilitas berada dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari komunitas

masyarakat luas. Akuntabilitas harus disiapkan oleh individu atau organisasi yang melakukan aktivitas kepada publik agar mendapat kepercayaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan. Akuntabilitas Museum La Pawawoi berdasarkan pada pernyataan bapak Andi Baso Bone Mappasissi dilakukan dengan:

“Disini kita tetap mengadakan sosialisasi, pendekatan terhadap organisasi, sekolah-sekolah untuk lebih memperkenalkan keberadaan museum, fungsi-fungsi museum itu apa terus apa-apa saja yang ada di museum itu. Sejarah dan benda-benda budaya kita perkenalkan ke mereka untuk memicu motivasi daya cinta mereka terhadap budaya.”

Kemudian beliau melanjutkan:

“Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya dimana mereka juga kita ajak terlibat untuk melakukan kesenian budaya disini sebagai bentuk kontribusinya dia terhadap budaya dimana mereka memahami budaya yang itu adalah identitas mereka. Dari situlah mereka akan tercipta kecintaannya, kita berikan motivasi, sediakan panggung, kita dorong dan support, pemerintah juga kita dorong untuk mengadakan kegiatan-kegiatan *event* supaya mereka terdorong untuk melakukan itu.”

Dalam mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan komitmen dari dua pihak yaitu antara pemberi dan penerima. Masing-masing pihak harus terlibat dalam setiap kegiatan dan keputusan karena sering kali dimensi akuntabilitas bagi prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) tidak sejalan. Berdasarkan pada pemaparan beliau, menunjukkan adanya komitmen pihak Museum La Pawawoi untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan Bone. Menurut hemat peneliti hal tersebut bukan sekadar kata-kata tapi benar terapkan. Terbukti dengan dibentuknya sanggar seni *Saoraja* yang anggotanya merupakan anak-anak muda dan memang mereka selalu mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengangkat tema budaya Bone.

Disinilah pentingnya pemerintah melibatkan *stakeholder* khususnya masyarakat adat dalam setiap kegiatan dan keputusan terkait pelestarian aset bersejarah. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan aset bersejarah dapat menjadi penjamin bahwa akuntabilitas pemerintah sesuai dengan pengharapan dan kebutuhan masyarakat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Asas kewajaran dan kesetaraan menuntut perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kharisma, 2014). Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang atau sekelompok orang yang tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Menurut bapak Andi Reski Abriansyah bahwa setiap masyarakat harus memperoleh pengetahuan kebudayaan, yang salah satunya dilakukan dengan sosialisasi kebudayaan.

“Diadakan sosialisasi bahwa pentingnya menjaga kelestarian budaya sebagai bukti sejarah yang mengandung pendidikan. Contohnya pada pembuatan tembikar yang melambangkan kesabaran, dan semua benda-benda bersejarah memiliki makna dan filosofi tersendiri.”

Sosialisasi kebudayaan merupakan langkah awal untuk mengenalkan nilai-nilai budaya bagi masyarakat, sebagaimana contoh yang diberikan oleh bapak Andi Reski sebelumnya bahwa dengan mengetahui makna dan filosofi dari benda-benda bersejarah akan meningkatkan kesadaran dan penghargaan kita terhadap aset bersejarah. Banyaknya kegiatan kebudayaan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bone dan terbuka untuk umum merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap budaya dan pentingnya menyalurkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan.

Setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki hak yang sama untuk menerima pelayanan publik yang berkualitas. Tersedianya akses yang mudah terhadap aset-aset bersejarah sebagai barang publik akan memberi kepuasan tersendiri bagi masyarakat sehingga kepercayaan terhadap pengelola aset bersejarah akan meningkat.

4. Good Public Governance dalam Upaya Merumuskan Praktik Akuntansi Aset Bersejarah

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan pada dasarnya telah diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, khususnya di Indonesia. Standar internasional seperti FRS 30 di Inggris, GRAP 103 dan masih banyak lagi standar yang lebih spesifik mengatur tentang bagaimana perlakuan akuntansi yang sesuai untuk aset bersejarah. Karena keistimewaan dari aset ini sehingga dibutuhkan usaha maksimal dalam melakukan pertanggungjawabannya.

Sesuai dengan tujuan pengadaannya yaitu untuk kemakmuran rakyat, maka tidak ada salahnya untuk meninjau perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan pada perspektif barang publik dimana memasukkan unsur-unsur *good public governance* dalam setiap praktik yang ada. *Good public governance* sendiri tidak hanya berfokus pada satu aktor yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun juga pada sektor bisnis dan masyarakat. Partisipasi masyarakat lebih diutamakan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Pelaksanaan peran dan keterlibatan masing-masing pihak antara negara, swasta

dan masyarakat akan melahirkan suatu kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta terciptanya sistem pemerintahan terbuka dan sehat.

Tabel 5
Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Berdasarkan *Good Public Governance*

Standar Akuntansi Aset Bersejarah	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Museum La Pawawoi	<i>Good Public Governance</i>
Pengakuan: Pengakuan aset akan sangat andal bila diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada penguasaannya dipindahkan. (SAP 07 paragraf 66)	Aset bersejarah Museum La Pawawoi diakui jika data-datanya lengkap dan setelah dilakukan peregristrasian sebagai benda cagar budaya.	Aset bersejarah diakui sebagai aset pemerintah dan dikategorikan dalam barang publik dan terpisah dari aset tetap pemerintah.
Pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. (SAP 07 paragraf 45) • Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 	Museum La Pawawoi tidak diukur menggunakan harga perolehan maupun dengan nilai wajar, disamping karena diperoleh melalui warisan juga Museum La Pawawoi termasuk dalam kategori <i>non-</i>	Harga perolehan maupun nilai wajar tidak dapat diperoleh dari aset bersejarah yang diperoleh tanpa biaya.

<p>sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. (SAP 07 paragraf 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi <i>non-exchange</i> suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. (GRAP 103) 	<p><i>operational heritage assets.</i></p>	
<p>Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar (SAP 07 paragraf 65) • Semua lembaga harus 	<p>Metode penilaian apapun tidak diterapkan pada Museum La Pawawoi. Manfaat yang diperoleh hanya sebatas pada nilai sejarahnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada metode revaluasi yang sesuai dengan aset bersejarah dan lebih menonjolkan nilai-nilai <i>intangible</i> yang terkandung dalam aset bersejarah yang tidak dapat dinominalkan.

<p>menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. (Act Accounting Policy 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. (FRS 30) 		<ul style="list-style-type: none"> • Lebih berfokus pada pelestarian aset bersejarah.
<p>Penyajian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam CaLK tanpa nilai. (SAP 07 paragraf 68) • Aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam neraca atau CaLK. (FRS 30) 	<p>Dinas Kebudayaan maupun BPCB Sulsel tidak menyajikan Museum La Pawawoi dalam laporan keuangannya dalam bentuk unit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian aset bersejarah di neraca harus didukung dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi kualitatif. • Menyajikan di lembar muka laporan keuangan mengenai kebijakan manajemen aset bersejarah lebih dianjurkan. • Penyajian mengenai biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk

		mempertahankan keberadaan aset bersejarah.
Pengungkapan: <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. (SAP 07 paragraf 64) • Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. (SAP 07 paragraf 83) 	Museum La Pawawoi tidak diungkapkan dalam CaLK Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone maupun BPCB Sulsel.	Pengungkapan tambahan mengenai aset bersejarah diluar laporan keuangan sangat dianjurkan demi keterpahaman dan transparansi informasi yang dihasilkan.

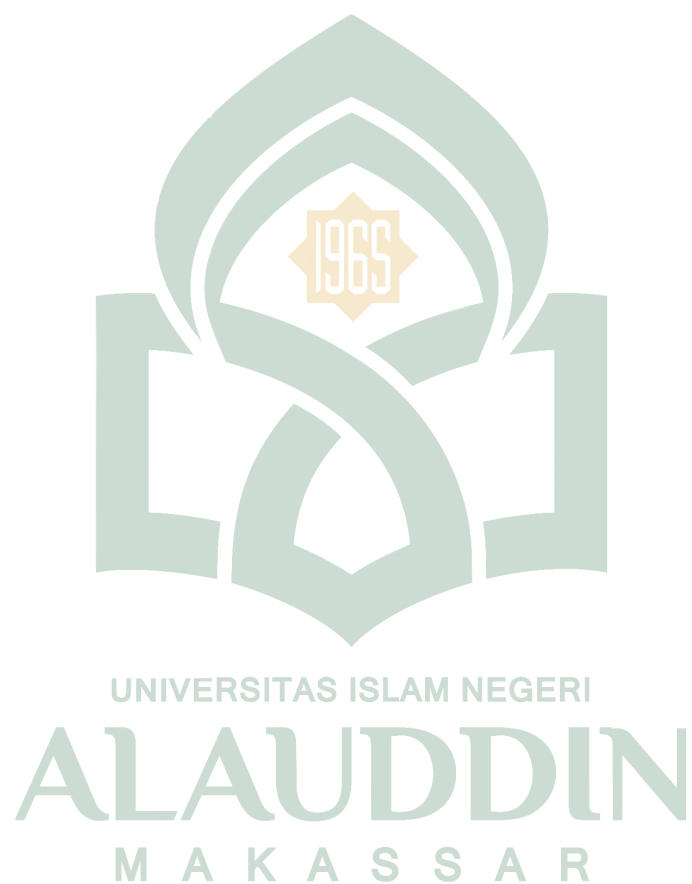
Berdasarkan pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa beberapa standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah menekankan pada pemberian nilai ekonomik, bagaimana menentukan metode penilaian yang tepat sehingga nilai moneter dari aset bersejarah dapat diukur dengan andal untuk dapat diakui dan diungkapkan di neraca. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi transparansi sebagai akibat dari penerapan basis akrual di sektor publik yang mengharuskan semua aset pemerintah tercantum dalam laporan keuangan. Padahal dalam penelitian Biondi dan Lapsley (2014) yang mengkaji beberapa

standar akuntansi aset bersejarah menemukan bahwa transparansi dalam penilaian aset bersejarah tidak dapat tercapai, bahkan pada tingkat yang paling rendah. Aset bersejarah bukan jenis aset yang digunakan untuk kegiatan operasional entitas serta tidak terdapat pasar untuk dijadikan acuan penilaian, sehingga sangat sulit menentukan nilai atau harga yang andal.

Good public governance merupakan konsep dimana lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan. Hal ini sangat sesuai dengan keberadaan aset bersejarah, yaitu untuk kepentingan sosial dan budaya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Akan sangat tepat jika aset bersejarah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu barang publik dan terpisah dari aset modal pemerintah. Dengan membedakan aset bersejarah dengan aset modal pemerintah maka yang menjadi fokus utama adalah bukan lagi pada aspek nilai moneterinya, tetapi bagaimana aset bersejarah dilestarikan dan dipelihara agar tetap dalam kondisi yang baik. Pengungkapan informasi deskriptif pun sangat ditekankan untuk dilakukan terutama diluar laporan keuangan, karena akan mempermudah akses terhadap informasi tersebut.

Aset bersejarah Museum La Pawawoi termasuk dalam kategori *non-operational heritage assets* dimana hanya memberi manfaat berupa nilai sejarah dan kebudayaan, sehingga sangat tepat bila diakui sebagai barang publik. Barton (2000; 2005) menegaskan bahwa aset bersejarah tidak dapat dinilai dengan andal dalam hal keuangan dan mengusulkan aset bersejarah disebut sebagai ‘fasilitas’ dan dipertanggung jawabkan secara terpisah dari laporan keuangan. Lebih lanjut, Barton (2000) menyebutkan bahwa aset bersejarah memenuhi atribut sebagai

barang publik, untuk itu pemerintah membuat kebijakan untuk pelayanan bahwa aset bersejarah diakui sebagai barang publik karena lebih efektif dan efisien daripada melalui pasar swasta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset bersejarah dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan harus sesuai dengan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam aset bersejarah. Aset bersejarah diakui sebagai aset pemerintah dan dikategorikan sebagai barang publik. Melakukan pengukuran pada aset bersejarah menggunakan harga perolehan bukanlah hal mudah karena kebanyakan dari aset bersejarah diperoleh melalui donasi maupun diwariskan secara turun temurun, sedangkan berbagai metode penilaian tidak dapat diterapkan pada aset bersejarah dan para informan sependapat bahwa nilai *intangible* dari aset bersejarah tidak dapat dinominalkan. Adapun penyajian aset bersejarah harus dilakukan dengan rinci dilengkapi dengan penyajian informasi kualitatif.

Karena *stakeholder* dari pengelolaan aset bersejarah adalah masyarakat maka pengungkapan wajib saja tidak akan memadai, untuk itu dibutuhkan pengungkapan lain diluar daripada yang telah ditetapkan oleh standar. Pengungkapan tersebut mencakup berupa informasi deskriptif mengenai aset bersejarah seperti, visi misi, sasaran, jumlah pengunjung, kepuasan pelanggan, pihak-pihak berelasi, pendanaan, kebijakan konservasi, jumlah koleksi dan lain sebagainya yang dapat menunjang keterpahaman *stakeholder* akan informasi yang disediakan. Berdasarkan pada konsep *good public governance* aset bersejarah

lebih tepat disebut dengan barang publik (*public goods*) dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan atribut barang publik. Sesuai dengan tujuan pengadaan aset bersejarah yaitu melestarikan budaya bangsa sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Disediakan untuk pelayanan publik agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Untuk itu segala bentuk aktivitas dan kebijakan terkait aset bersejarah harus melibatkan peran serta masyarakat agar tercapai akuntabilitas yang searah antara agen (pemerintah) sebagai pengelola dengan prinsipal (masyarakat).

Pertanggungjawaban akuntansi aset bersejarah Museum La Pawawoi sampai saat ini belum dilakukan, baik dari pihak Museum maupun Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Aset bersejarah tidak diakui dan diungkapkan di neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, hal ini disebabkan tidak adanya nilai yang dilekatkan pada aset bersejarah sehingga mereka tidak mengakuinya dalam laporan keuangan.

B. Impikasi Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik aset bersejarah akan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pengelola aset bersejarah melalui pertanggungjawaban yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

C. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan penelitian untuk perbaikan di masa mendatang:

1. Pemerintah sebagai pengelola aset bersejarah hendaknya membuat pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan aset bersejarah. Bukan hanya melalui laporan keuangan, tetapi melalui pengungkapan lain yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya dari aset bersejarah. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus andal dan dapat dipahami oleh pemakai.
2. Masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam setiap prosedur dan kebijakan mengenai aset bersejarah agar tercapai akuntabilitas bersama, bukan hanya akuntabilitas menurut pemerintah, juga akuntabilitas menurut masyarakat sebagai pengguna dari aset bersejarah.
3. Penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan informan seperti sejarawan atau masyarakat adat dan mengkaji berdasarkan pada perspektif prinsipal atau penguasaan aset bersejarah itu sendiri, serta memperpanjang waktu penelitian guna memperoleh data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Accounting Standar Board. Financial Reporting Standar 30 Heritage Assets. 2009.

_____. Financial Reporting Exposure Draft 42 Heritage Assets. 2008.

Act Accounting Policy. Heritage and Community Assets. 2009.

Adam, Berit., Riccardo Mussari dan Rowan Jones. 2011. The Diversity of Accrual Policies in Local Government Financial Reporting: An Examination of Infrastructure, Art and Heritage Assets in Germany, Italy and the UK. *Financial Accountability & Management*, 27 (2): 107-120.

Agustini, Aisa Tri dan Hendrawan Santosa Putra. 2011. Aset Bersejarah dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *JEAM*, 10 (1): 1-29.

Anggraini, Fauziah Galuh dan Anis Chariri. 2014. Perlakuan Akuntansi untuk Aset bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2): 1-13.

Annual Report, Museum Board of Voctoria. 2017-2018.

Ariningsih, I Gusti Ayu Arya dan Saptono Nugroho. 2015. Pelestarian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Subak sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3 (2): 26-34.

Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2): 122-141.

Aversano, Natalia dan Johan Christiaens. 2014. Governmental Financial Reporting of Heritage Assets from a User Needs Perspective. *Financial Accountability & Management*, 30 (2): 150-175.

Azlim., Darwanis dan Usman Abu Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1 (1): 1-14.

Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10 (1) : 46-62.

Bakri, Aidatul Fadzlin., Nooridayu Ahmad Yusuf dan Norajlin Jaini. 2012. Managing Heritage Assets: Issue, Challenges and the Future of Historic Bukit Jugra, Selangor. *Procedia-Social and Behavioral Science*, 68 : 341-352.

Barton, Allan D. 2000. Accounting for Public Heritage Facilities – Assets or Liabilities of the Government. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13 (2): 219-235.

_____. 2005. The Conceptual Arguments Concerning Accounting for Public Heritage Assets: A Note. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18 (3): 434-440.

- Basnan, Norida., Mohd Fairuz Md. Salleh., Azlina Ahmad., Azizah Mohd Harun dan Ismail Upawi. 2015. Challenges in Accounting for Heritage Assets and the Way Forward: Towards Implementing Accrual Accounting in Malaysia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 11 (11): 63-73.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Biondi, Lucia dan Irvine Lapsley. 2014. Accounting, Transparency and Governance: the Heritage Assets Problem. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11 (2): 146-164.
- Bovaird, Tony dan Elke Löffler. 2003. Evaluating the Quality of Public Governance: Indicators, Models and Methodologies. *International Review of Administrative Sciences*, 69 (3): 313-328.
- Budoyono, Sapto. 2014. Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 14 (2): 607-622.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi 2. Surabaya: Prenada Media Grup.
- Carnegie, Garry D. Dan Peter W. Wolnizer. 1996. Enabling Accountability in Museum. *AAAJ*, 9 (5): 84-99.
- Christianes, Johan., Jan Rommel., Allan Barton dan Patricia Everaert. 2012. Should a Capital Goods of Governments be Recognised as Assets in Financial Accounting?. *Baltic Journal of Management*, 7 (4): 429-443.
- Darmawan, Cokorda Bagus., I Ketut yadnyana dan I Putu Sudana. 2017. Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung). *E-Jurnal Ekonomi Universitas Udayana*, 6 (5): 1785-1816.
- Dawes, Sharon S. dan Natalie Helbig. 2010. Information Strategies for Open Government: Challenges and Prospects for Deriving Public Value from Government Transparenc, pp. 50-60.
- Dhiza, Arrauda. 2017. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah dan Taman Budaya Provinsi Riau. *JOM FISIP*, 4 (2): 1-12.
- Ellwood, Sheila. 2018. *Accounting for What We Treasure: Economic Valuation of Public Heritage*. Oxford Handbooks Online.
- _____. dan Margareth Greenwood. 2015. Accounting for Heritage Assets: Does Measuring Economic Value 'Kill the Cat'?. *Critical Perspectives on Accounting*.
- Emzir. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fendri, Azmi. 2011. Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1): 96-107.
- Financial Statements*, UNESCO. 2016.
- Grimmelikhuijsen, Stephan G. 2010. Transparency of Public Decision-Making: Towards Trust in Local Government?. *Policy & Internet*, 1 (2): 5-35.

- Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8): 1-15.
- Harjiyatni, Francisca Romana dan Sunarya Raharja. 2012. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 24 (2): 187-375.
- Hassan, Nor Laili., Natrah Saad., Halimah Nasibah Ahmad., Mohammed Suhaimi Mohammed Salleh dan Mohamad Sharofi Ismail. 2016. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (S6) : 80-83.
- Heald, David. 2012. Why is Transparency About Public Expenditure so Elusive?. *International Review of Administrative Sciences*, 78 (1): 30-49.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *CBAM*, 2 (1): 82-90.
- Hidayat, Dedy. 2002. Metodologi Penelitian dalam Sebuah “Multi-Paradigm Science”. *Mediator*, 3(2): 197-220.
- Hone, Phillip. 1997. The Financial Value of Cultural, Heritage and Scientific Collections: A Public Management Necessity. *Australian Accounting Review*, 7 (1): 38-43.
- Hooper, Keith., Kate Kearins dan Ruth Green. 2005. Knowing “the Price of Everything and the Value of Nothing”: Accounting for Heritage Assets. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18 (3): 410-433.
- Howard, Peter. 2003. *Heritage: Management, Interpretation, Identity*. London: Continuum.
- Indonesai, *Undang-Undang tentang Cagar Budaya*, UU No. 11 Tahun 2010.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009.
- International Public Sector Accounting Standards Board*. Consultation Paper Financial Reporting for Heritage in the Public Sector. 2017.
-
- International Public Sector Accounting Pronouncements. Edisi 1. 2014. Handbook of
-
- International Public Sector Accounting Pronouncements. Edisi 1. 2017. Handbook of
-
- Jailani. 2015. Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, 8 (1): 134-147.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan*. Malang: Seri Media dan Literasi.
- Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19 (1): 1-35.
- Komite Nasional Kebijakan Governance*. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. 2008.

- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *JIANA Jurnal Ilmu dan Adm Negara*, 7 (1): 52-70.
- Lee, Gwanhoo dan Young Hoon Kwak. 2012. An Open Government Maturity Model for Social Media-Based Public Engagement. *Government Information Quarterly*, 29 (4): 492-503.
- Legget, Jane. 2018. Shared Heritage, Shared Authority, Shared Accountability? Co-Generating Museum Performance Criteria As a Means of Embedding 'Shared Authority'. *International Journal of Heritage Studies*, 1-21.
- Mahlel., Muhammad Ridwan dan Nasirwan. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen). *j-EBIS*, 2 (2): 1-20.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2014. Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1): 1-18.
- Martins, Orleans Silva., Antonio Maria Beyle De Araujo., Diana Vaz De Lima dan Jorge Katsumi Niyama. 2014. A Discussion on the Accounting Treatment of Heritage Assets. *ConTexto, Porto Alegre*, 14 (26): 66-75.
- Muhammadiyah. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2): 127-137.
- Nawawi, Juanda. 2012. membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1 (3) : 19-29.
- Noviati, Cora Elly. 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10 (2): 334-354.
- Nurhayati. 2015. Melukis Akuntansi dengan Kuas Interpretif. *BISNIS*, 3 (1): 175-191.
- Ouda, Hassan A.G. 2014. A Practical Accounting Approach for Heritage Assets under Accrual Accounting: with Special Focus on Egypt. *International Journal of Governmental Financial Management*, 14 (2): 1-18.
- _____. 2014. Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices. *Journal of Finance and Accounting*, 2 (2): 19-33.
- Paranoan, Natalia. 2015. Riset Non Positivistik Akuntansi dalam Tiga Paradigma: Interpretif, Kritis dan Posmodernisme. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10 (1): 8-18.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, No. 07 Tahun 2010.
- _____. *Museum*, No. 66 Tahun 2015.
- Rahayuningtyas, Dwi Prihatni Amrih dan Dyah Setyaningrum. 2017. Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1 (4): 431-450.
- Randa, Fransiskus dan Fransiskus E. Daromes. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5 (3) : 345-510.
- Rofikoh, Nurul. 2006. Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik. *JKAP*, 10 (1) : 51-64.

- Safitri, Mia Rizky dan Mirna Indriani. 2017. Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2 (2): 1-9.
- Sari, Kusuma Dewi Arum dan Wahyu Agus Winarno. 2012. Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. *JEAM*, 11 (1): 1-19.
- Setyobudi, Yustinus Farid. 2013. Peran Masyarakat dalam Pelayanan Publik Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Dimensi*, 2 (1): 1-9.
- Sholikah, Mar'atus dan Bety Nur Achadiyah. 2017. Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang. *Jurnal Nominal*, 6 (2): 29-47.
- Sutopo, HB. 2002. Metode Penelitian Sastra: Epistimologi Model Teori Dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Suwardjono. 2016. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Syamsudin M. 2007. Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum. *UNISA*, 30 (64): 183-194.
- Thamrin, Djuni. 2017. Membuka Ruang Baru Demokrasi: Partisipatif bagi Community Policing: Peran Forum Warga. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3 (1): 64-83.
- Valuation Guidance for Cultural and Heritage Assets. 2002.
- Weber, Edward P. 1999. The Question of Accountability in Historical Perspective from Jackson to Contemporary Grassroots Ecosystem Management. *Administration & Society*, 31 (4) : 451-494.
- Wei, Ting Ling., Howard Davey dan David Coy. 2008. A Disclosure Index to Measure the Quality of Annual Reporting by Museums in New Zealand and the UK. *Journal of Applied Accounting Research*, 9 (1): 29-51.
- Wild, Susan. 2013. Accounting for Heritage, Cultural and Community Assets – Alternative Metrics from a New Zealand Maori Educational Institution. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7 (1): 1-22.
- Wulandari, Dessy dan A.A. Gde Satia Utama. 2016. Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. *Prosiding Seminar Nasional*: 801-812.
- Yusoff, Yuszaidy Mohd., Hanapi Dollah dan Ab Samad Kechot. 2013. Perlindungan Harta Warisan: Keberkesanan Usaha Pemulihan dan Pemeliharaan dalam Pembangunan Negara. *Malaysian Journal of Society and Space*, 9 (2): 64-77.

L

A

M

P

I

R

A

N



RESUME WAWANCARA

Nama Narasumber : A. Reski Abriansyah

Jabatan : Pengelola Museum dan Benda Cagar Budaya Dinas Kebudayaan
Kab. Bone

Waktu Wawancara : Dinas Kebudayaan Kab. Bone/ 27 Agustus 2018

1. Menurut bapak aset bersejarah itu seperti apa?

Jawaban : Aset bersejarah merupakan aset yang dilindungi oleh Undang-Undang yang sarat akan nilai budaya serta pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mendanainya.

2. Aset bersejarah sarat akan nilai budaya serta pendidikan dan biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan pula, menurut pendapat bapak bagaimana jika aset bersejarah dinilai dalam satuan rupiah?

Jawaban : Aset bersejarah tidak dapat diberi harga, kita tidak akan bisa menghitung nilainya apalagi benda-benda bersejarah yang memiliki nilai spiritual.

3. Menurut pendapat bapak bagaimanakah seharusnya pengakuan aset bersejarah itu sendiri?

Jawaban : Aset bersejarah itu sendiri dapat diakui jika data-datanya lengkap, asal usul sejarahnya jelas, pemakainya siapa dan yang jelas sarat akan nilai. Terdapat kategori-kategori dan yang pasti kita tahu betul sejarah dari

aset bersejarah tersebut. Terkait dengan registrasi aset bersejarah disini terdapat bagian tersendiri yang melakukan peregistrasian.

4. Menurut bapak bagaimanakah seharusnya pengelolaan aset bersejarah yang baik?

Jawaban : Pengelolaan secara terus menerus dan sebaiknya disetiap bidang dalam suatu museum harus ada tenaga ahli seperti ahli pemeliharaan, adanya pengawasan yang memadai, tempat menyimpan benda-benda bersejarah harus selalu steril, dan antara pengunjung dan benda-benda bersejarah ada pembatas agar tidak tersentuh langsung.

5. Menurut pendapat bapak bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian aset bersejarah?

Jawaban : diadakan sosialisasi bahwa pentingnya menjaga kelestarian budaya sebagai bukti sejarah yang mengandung pendidikan. Contohnya pada pembuatan tembikar yang melambangkan kesabaran, dan semua benda-benda bersejarah memiliki makna dan filosofi tersendiri.

6. Informasi apa saja yang perlu di ungkapkan terkait aset bersejarah kepada stakeholder?

Jawaban : tentunya banyak sekali.

7. Menurut pendapat bapak apakah UU dan peraturan terkait mengenai aset bersejarah sudah memadai?

Jawaban : Belum memadai. Tapi sebenarnya jika Undang-Undang tersebut benar-benar dilaksanakan maka sebenarnya cukup memadai. Seperti halnya masalah pendanaan pengelolaan aset bersejarah yang berasal

dari pemerintah, tapi museum lapawawoi sampai sekarang tidak memperoleh dana dari pemerintah dan masi berbentuk swadaya yang pendanaannya berasal dari sumbangan masyarakat.

8. Sangat sedikit sekali informasi mengenai museum Lapawawoi, baik itu internet atau media lain. Mengapa demikian?

Jawaban : Memang agak sedikit informasi mengenai museum, entah apakah itu strategi kalau orang-orang ingin tahu tentang barang-barang di museum bisa datang langsung ke museum. Dulu pernah ada mahasiswa yang meneliti di museum Lapawawoi untuk membuat website tapi sampai sekarang kami belum menerima hasilnya.

Nama narasumber : A. Baso Bone Mappasissi

Jabatan : Pimpinan Museum Lapawawoi Kab.Bone

Waktu Wawancara : Museum Lapawawoi/ 29 Agustus 2018

1. Menurut pendapat bapak apakah aset bersejarah termasuk dalam kategori aset?

Jawaban: Aset bersejarah masuk dalam kategori aset, dia aset daerah juga.

Karena semua benda-benda itu sudah diserahkan ke pemerintahan termasuk aset pusaka, semua sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah khususnya secara umum aset secara nasional.

2. Bagaimana cara perolehan aset-aset yang terdapat di Museum?

Jawaban : Ada memang benda-benda peninggalan yang dimiliki oleh kerajaan pada masa itu termasuk stempel-stempel kerajaan, itukan sesuai masa pemerintahan yang dipegang oleh *Ade' Pitu* sebagai salah satu pusaka kerajaan Bone termasuk peninggalan raja Bone ke-2 Laummasa Petta Panrebessie. Itu menjadi sebuah pusaka *Arajang* yang memang dirawat dan dijaga oleh kerajaan pada masa itu secara turun temurun. Dan sebagian alat-alat diatas itu merupakan alat-alat pribadi dari Almarhum A.Mappasissi Petta Awampone yang memang mereka dimiliki secara turun temurun secara pribadi dan memang itu ditata bahkan ke pemerintahan di Museum Lapawawoi.

3. Bagaimana pendapat bapak jika aset bersejarah dinilai dalam satuan rupiah?

Jawaban : tidak, karena memang disini untuk dimuseumkan saja. Bahkan kalau ada orang luar turunan pribadi yang mau menghibahkan atau menjual kita upayakan untuk beli kalau memang dananya cukup atau bagaimanakah upayanya.

4. Bagaimana pencatatan aset bersejarah yang dibeli oleh pihak museum?

Jawaban : Kalau dibeli secara pribadi itu hanya catatan pribadi kecuali kalau pemda yang beli itu dicatat oleh pemerintah daerah sendiri yang sekarang dibawah naungan Dinas Kebudayaan yang dulu dibawah naungan Dinas Pariwisata.

5. Apakah sebelumnya pernah digunakan jasa penilai untuk aset bersejarah yang dimiliki museum?

Jawaban : Tidak, karena kita memang tidak pernah memberikan harga dan tidak pernah berniat untuk menjual. Kecuali kolektor-kolektor mereka punya nilai tersendiri, sebelumnya mereka sudah memahami bahwa di museum ini tidak ada barang yang diperjual belikan jadi mereka juga tidak menawar.

6. Kenapa pihak Museum Lapawawoi tidak memberlakukan karcis masuk?

Jawaban : Itu karcisnya pernah saya tanyakan di Direktorat Permuseuman dibawah naungan Dirjen Kebudayaan pernah menjelaskan ke kepala museum nasional bahwa untuk pengadaan retribusi untuk museum sebenarnya tidak layak dibenarkan karena museum untuk edukasi.

Adapun penggunaan retribusi hanya mengatur arus pengunjung jika daya tampung museum itu tidak sesuai dalam artian lebih kecil daripada jumlah pengunjung yang masuk, jadi untuk mengatur supaya pengunjung itu bisa memenuhi dan bisa masuk ke museum itu maka diberlakukanlah retribusi supaya pengunjung ini jangan keluar masuk, satu kali masuk, keluar, yah jangan masuk lagi dan memberikan kesempatan pada yang dibelakang yang ingin masuk. Nah itu gunanya retribusi untuk museum, beda kalau dibioskop atau apa, begitu.

7. Bagaimana memaksimalkan peran masyarakat terhadap pelestarian aset bersejarah?

Jawaban : Disini kita tetap mengadakan sosialisasi, pendekatan terhadap organisasi, sekolah-sekolah untuk lebih memperkenalkan keberadaan museum, fungsi-fungsi museum itu apa terus apa-apa saja yang ada di museum itu. Sejarah dan benda-benda budaya kita perkenalkan ke mereka untuk memicu motivasi daya cinta mereka terhadap budaya. Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya dimana mereka juga kita ajak terlibat untuk melakukan kesenian budaya disini sebagai bentuk kontribusinya dia terhadap budaya dimana mereka memahami budaya yang itu adalah identitas mereka. Dari situlah mereka akan tercipta kecintaannya, kita berikan motivasi, sediakan panggung, kita dorong dan support, pemerintah

juga kita dorong untuk mengadakan kegiatan-kegiatan event supaya mereka terdorong untuk melakukan itu.

8. Menurut pendapat bapak bagaimana pengelolaan aset bersejarah yang baik ?

Jawaban : Memang sudah ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu lebih baiknya. Biasanya disini ada rencana pemerintah untuk membentuk sebuah manajemen yang baru dengan skala nasional. Jadi ada Direktur Museum

9. Apakah yang menyebabkan sehingga sangat kurang informasi mengenai Museum Lapawawoi baik itu di internet maupun di media lain?

Jawaban : Kalau persoalan informasi itukan tergantung siapa adminnya, bagaimana mereka mendapatkan informasi, seberapa besar upaya mereka untuk mendapatkan informasi. Jadi disini kita juga menunggu informasi apa yang mereka butuhkan dan itu yang kita berikan. Kita juga tidak tahu. Kalau memang pemerintah, dinas-dinas ini membuat sebuah website, website itu apa, arahnya kemana, apa saja yang dimuat disitu, apa yang mau dia informasikan. Kita tidak tau, jadi kita hanya menunggu kalau memang data-data di instansi kami dibutuhkan untuk di website itu kami siap memberikan.

10. Apakah terdapat laporan tahunan pak?

Jawaban : Ada, laporan tahunan tetap dicatat oleh Dinas Kebudayaan sendiri.

Karena kan Dinas Kebudayaan sendiri yang langsung mengawasi museum, di BPCB juga ada.

11. Jadi yang melakukan inventarisasi aset-aset bersejarah yang dimiliki museum Lapawawoi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan pak?

Jawaban : Iya, Dinas Kebudayaan dan BPCB.

12. Menurut pendapat bapak bagaimana pentingnya informasi aset bersejarah untuk diketahui oleh para stakeholder?

Jawaban: Kita butuh dukungan dan support dari semua pihak, dari semua elemen akan pentingnya sebuah budaya sebagai identitas budaya, dimana budaya merupakan sebuah aset atau ikon kebangsaan. Nah itu yang kita butuhkan, jadi butuh memang support dari pemerintah itu sendiri, pemerintah setempat utamanya untuk lebih giat mensosialisasikan sejarah budaya ini ke sekolah-sekolah. Mungkin seperti mengaktifkan kembali muatan lokal atau bahasa daerah, pengenalan sejarah supaya kita orang-orang Bone khususnya generasi Bone harus lebih memahami sejarah budaya itu sendiri dibanding budaya-budaya luar yang sekarang kita lebih banyak mengonsumsi budaya asing, kalau tidak untuk mencegah yah untuk mengimbangi. Setidaknya kita punya pondasi sendiri sebelum menyambut, sebelum mengonsumsi budaya luar.

13. Menurut pendapat bapak apakah informasi mengenai nilai keuangan aset bersejarah penting untuk diketahui?

Jawaban : Penting juga diketahui, karena sekarang kan serba ekonomi serba uang jadi penting juga kita ketahui. Mungkin walaupun nilai ekonominya itu nilai suatu bendanya kita bisa tau sehingga berapa besar nilainya itu mungkin bisa memicu sehingga kita bisa menjaga kenapa tidak, atau bisa lebih peduli karena persoalan nilai kenapa tidak. Apapun itu kita harus lakukan untuk lebih peduli terhadap ini, kalau persoalan nilai yang bisa memotivasi kita lebih peduli.. oke kita lakukan. Karena terkadang untuk sesuatu yang dianggap tidak bernilai sudah tidak dipedulikan tapi kalau dianggap bernilai wah dijaga bukan main kalau perlu dikawal polisi, kan begitu.

Narasumber : Nurdianti, S.E

Jabatan : Pembuat Laporan Keuangan BPCB Sul-Sel

Tempat/Waktu Wawancara : Fort Rotterdam/ 26 September 2018

1. Menurut ibu, apa saja kriteria utama yang harus dimiliki suatu barang/benda peninggalan bersejarah untuk dapat dimasukkan ke dalam jenis kategori aset bersejarah?

Jawaban : Punya nilai sejarah, punya nilai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Intinya tiga itu. Jadi banyak bangunan yang umurnya 50 tahun. Kan kriteria awal itu berumur 50 tahun, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

2. Menurut ibu, apakah perlu aset bersejarah dilakukan penilaian?

Jawaban : Kalau menurut ibu sih tidak perlu dilakukan penilaian, memang untuk beberapa pihak mengukur nilai uang itu kan sebenarnya untuk estimasi umur ekonomis kan, sedangkan aset bersejarah kita tidak bisa perkirakan umur ekonomisnya berapa. Nilainya pun berbanding terbalik dengan aset pada umumnya, semakin lama nilainya semakin meningkat.

3. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BPCB dalam melakukan penilaian terhadap aset bersejarah bu?

Jawaban : Aset bersejarah itu sulit dilakukan penilaian, karena nilainya sulit untuk diukur dengan satuan moneter. Harus ada tim penilai khusus

untuk menilainya dan harus melibatkan tim ahli seperti para arkeolog. Disamping itu harus ada anggaran khusus untuk itu dan biasanya proses waktu penilaiannya itu memakan waktu yang cukup lama.

4. Apakah bisa ditaksir nilai dari aset bersejarah ini? Sebelumnya apa pernah dilakukan appraisal/taksiran atas nilai aset nya bu?

Jawaban : Boleh ada taksiran. Kan yang namanya aset itu kan sudut pandang pembukuan keuangan kalau bangunan bersejarah sudut pandangnya dari nilai. Kan ini dua hal yang berbeda. Sekarang itu dicatatkan ke dalam pembukuan, bukan karena dia jelas-jelas tidak memiliki hasil ekonomi, tapi hasil tadi itu yang dia bawa Boleh ada taksiran, seperti bangunan dan tanahnya ini bisa ditaksir. Coba benteng ini kalau mau di nilai dengan aspek moneter, benteng ini mau kita kasih nilai berapa? Tanah di NJOP disini mungkin sudah 40 (empat puluh) juta per meter sekarang kali 21000m, Baru tanah itu. Sekarang kita lihat bangunan, bangunan umum yang tatanan batanya seperti begini saja itu per meter nya itu sudah 3 (tiga) juta, sekarang ini dengan berapa bata ini? Satu, dua, tiga, empat. Terus kalau kita mau hitung dari sisi moneter, berapa nilai yang harus kita kasih? Kalau memang nanti ada kebijakan untuk memoneteri dengan uang semua aset ini. Wah, besar sekali aset Negara ini.

5. Pengungkapannya sendiri bagaimana bu?

Jawaban : Kalau Museum La Pawawoi kita tidak akui dalam laporan keuangan BPCB karena itu merupakan aset daerah yah, dan itu memang tidak bisa dinilai. Nilainya suatu aset bersejarah tidak bisa kita tentukan berapa. Disini, kami hanya melakukan inventarisasi terkait item cagar budaya.



Narasumber : Muh. Yunus

Jabatan : Staf Dinas Kebudayaan

Tempat/Waktu Wawancara : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone/ 30 Agustus 2018

1. Menurut bapak aset bersejarah itu seperti apa pak?

Jawaban : Aset yang karena keberadaannya tidak lepas dari nilai sejarah dan minimal berusia 50 tahun.

2. Bagaimana menurut bapak jika aset bersejarah dinilai dengan satuan moneter?

Jawaban : Kalau penilaian menurut saya tidak perlu. Kita tidak bisa menentukan nilai dari aset bersejarah karena ini berada pada ranah subjektif. Nilai-nilai sosial yang terkandung tidak bisa dipadankan dengan ukuran uang.

3. Apa saja kendala sehingga aset bersejarah tidak bisa dinilai pak?

Jawaban : Balik lagi pada subjektifitasnya. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap nilai suatu aset bersejarah. Orang yang paham akan benda-benda bersejarah pastinya memberi nilai yang sangat tinggi kan, dan sebaliknya bagi orang yang awam atau yang tidak terlalu peduli dengan keberadaa benda-benda bersejarah akan menilai rendah.

4. Terkait pengungkapannya sendiri, apakah aset bersejarah diungkapkan dalam laporan keuangan Disnas Kebudayaan pak?

Jawaban : Tidak, disini kami belum mengakui dan mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan. Untuk sementara kami dalam proses penggalian nilai-nilai sejarah pada aset bersejarah yang dimiliki daerah.



D

O

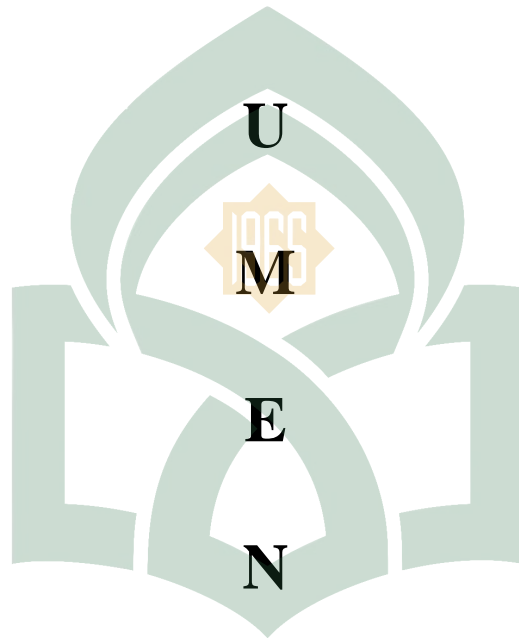
K

U

M

E

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

T
ALA UDDIN
A
M A K A S S A R

S

I

**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Andi Reski Abriansyah (Pengelola
Museum La Pawawoi) di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.**



**Dokumentasi pengambilan data di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi
Selatan**



Potret Museum La Pawawoi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nomor : 5970 /EB.I/PP.00.9/9/2018
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 12-September 2018

Kepada,

Yth. UPT P2T BKPM

di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatu.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Anita Nurkhafifah**
NIM : 90400114086
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga Lr.5

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

“Good Public Governance: Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi pada Museum Lapawawoi di Kabupaten Bone)”

Dengan Dosen pembimbing: **1. Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.**
2. Ahmad Efendi, SE., MM.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Museum Lapawawoi Kab. Bone.**

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6200/S.01/PTSP/2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

1. Bupati Bone

2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 5970/EB.I/PP.00.9/9/2018 tanggal 12 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANITA NURKHAFIFAH
Nomor Pokok : 90400114086
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" GOOD PUBLIC GOVERNANCE : SOLUSI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH (STUDI PADA MUSEUM LAPAWAWOI DI KABUPATEN BONE) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 September s/d 30 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
Makassar
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE, MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1054/VIII/IP/DPMPTSP/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ANITA NURKHAFIFAH**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 90400004086
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lonrong Kec. Ponre
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

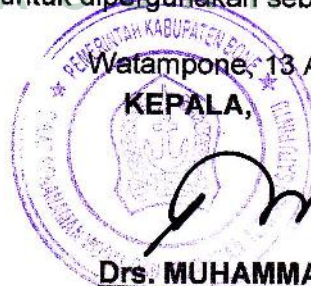
**“ GOOD PUBLIC GOVERNANCE SOLUSI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH
(STUDI PADA MUSEUM LAPAWAWOI DI KABUPATEN BONE)”**

Lamanya Penelitian : 13 Agustus 2018 s/d 13 September 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone, Pimpinan Museum Lapawawoi Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 13 Agustus 2018

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bone di Watampone
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone di Watampone
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
6. Pimpinan Museum Lapawawoi Kab. Bone di Watampone
7. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN

Jalan Ujung Pandang No. 1 Kompleks Benteng Rotterdam Makassar, 90111
Telepon : (0411) 3621701 – 3631117, Faksimili : (0411) 3621702
Laman : www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel, Pos mail : bpcb.makassar@yahoo.com

Nomor : 1847/E22.1/PG/2018

25 September 2018

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Anita Nurkhafifah

Di Makassar

Dengan Hormat, merujuk surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, nomor : 6200/S.01/PTSP/2018, tanggal 13 September 2018 perihal permohonan Izin Penelitian, dalam rangka penulisan Skripsi, yang akan dilaksanakan di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, atas nama :

Nama : Anita Nurkhafifah

Nim : 90400114086

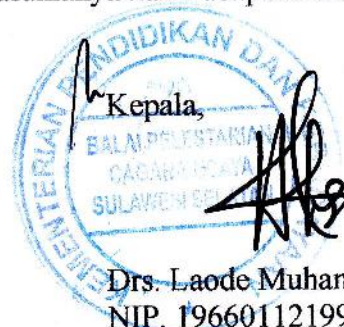
Program Studi : Akuntansi UIN Alauddin Makassar

Judul Skripsi : Good Public Governance : Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Pada Museum Lapawawoi Kab. Bone)

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Izin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan seperti; merusak, mencoreti, memindahkan, dan merubah bentuk/wujud terhadap Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian daripadanya sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Tidak Melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan peraturan lingkungan setempat atau aturan menurut agama/kepercayaan dan budaya masyarakat setempat;
3. Tidak melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan;
4. menyerahkan 1 (satu) copy laporan tertulis hasil penelitian kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan setelah dipertanggungjawabkan;
5. Koordinasi lebih lanjut, agar berhubungan dengan pengelola, penanggungjawab, atau pemilik Cagar Budaya/Situs yang dimaksud;
6. Izin ini berlaku mulai tanggal 18 September sampai dengan 30 Oktober 2018, perubahan jadwal harus dikonfirmasi kembali ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum
NIP. 196601121992031001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Penanggungjawab Benteng Rotterdam.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Tim Instruktur-Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis : Anita Nurkhafifah
NIM : 90400114086
Judul : Good Public Governance: Solusi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi pada Museum La Pawawoi di Kabupaten Bone)
Pembimbing I : Dr. Muh. Wahyudin Abdullah, SE, M.Si, Ak.
Pembimbing II : Ahmad Efendi, SE, MM.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar 9%. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Hasil.

Mengetahui



(Pembimbing)

Makassar, 05 November 2018

TIM Instruktur FEBI



Satriani S.I.P.

*Coret yang tidak perlu

*Catatan:

1-24% : "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49% : "Revisi Minor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74% : "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
75-100%

RIWAYAT HIDUP



Anita Nurkhafifah, dilahirkan pada 10 Maret 1996 di Padaelo, Kabupaten Bone. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, anak pasangan Bapak Kasman dan Ibu Hajirah. Penulis adalah penduduk asli Bone bersuku Bugis, tepatnya di Dusun Padaelo, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Bone. Penulis mulai mengenyam pendidikan pada tahun 2002-2008 di SD Inpres 3/77 Pattimpa, melanjutkan ke- MTs DDI Lonrong pada tahun 2008-2011, kemudian berlanjut ke- MA DDI Ponre pada tahun 2011-2014. Awal September 2014, penulis diterima menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memilih jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R